



LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

**PENINGKATAN PELAYANAN PENGELOLAAN
ASPIRASI MASYARAKAT YANG RESPONSIF,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

OLEH

**H. APRIZAL, S.Ag, SE, M.Si
NIP. 19720408 199803 1 005
NDH. 04**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXXVII
TAHUN 2024**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas DPRD, termasuk dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Masyarakat seringkali memerlukan akses yang cepat dan mudah terhadap informasi atau layanan publik, seperti permohonan informasi, pengaduan, atau penyampaian aspirasi. Peningkatan pelayanan publik, terutama dengan memanfaatkan teknologi, dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan dan meningkatkan responsivitas Sekretariat DPRD terhadap kebutuhan publik..

Inovasi perubahan yang dilaksanakan adalah upaya untuk Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Yang Responsif, Transparan Dan Akuntabel Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Yang Responsif, Transparan Dan Akuntabel Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan menyiapkan beberapa rencana kerja yang mencakup: 1. Advokasi ke stakeholder internal / eksternal, 2. Pembentukan tim kerja , 3. Membangun komitmen Bersama, 4. Penyusunan surat edaran, 5. Pembuatan SOP, 6. Pembuatan rancangan pengembangan fitur, 7. Sosialisasi dan desiminasi, 8. Implementasi , 9. Penyusunan pedoman penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat Proyek perubahan ini memiliki peran strategis dan perspektif kedepan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan melalui DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Melalui Kegiatan proyek perubahan ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat dapat lebih mudah dalam menyalurkan aspirasinya tentang permasalahan dengan mudah, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dengan mudah menginformasikan kepada OPD terkait dan anggota DPRD terkait aspirasi masyarakat ini.

Selain itu proyek perubahan ini juga menjadi bukti, bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah organisasi yang agile dan adaptif, yaitu organisasi yang mampu dengan cepat merespon perubahan dan beradaptasi dengan keadaan serta perkembangan zaman.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Profil Pelayanan Organisasi	9
C. Identifikasi Permasalahan	13
D. Strategi Penyelesaian Masalah	14
E. Tujuan dan Manfaat	26
F. Output dan Outcome	28
BAB II PELAKSANAAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS	30
A. Diskripsi Pelaksanaan Tahapan Rencana Strategis	30
B. Capaian Manfaat Jangka Pendek*)	49
C. Kepemimpinan Strategis	51
BAB III IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING; PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP; DAN ORGANISASI PEMBELAJAR	53
A. Implementasi Strategi Marketing (pra implementasi, proses implementasi, dan pasca implementasi jangka pendek)	53
B. Pengembangan Organisasi Pembelajar	58
BAB IV KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN	61
A. Jangka Menengah	61
B. Jangka Panjang.....	61
BAB V PEMANFAATAN MATA PELATIHAN PILIHAN DALAM IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	63
BAB VI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM ADOPSI PROYEK PERUBAHAN	66
BAB VII IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	67



BAB VIII PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	71
C. Lesson Learned	71
 DAFTAR PUSTAKA.....	 72
 LAMPIRAN.....	 73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Secara Langsung Tahun 2021-2023.....	8
Tabel 1.2. Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara Tertulis Tahun 2021-2023	8
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	12
Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 1.6. Formulasi SWOT	17
Tabel 1.7. Tahapan Kegiatan	23
Gambar 5.2 Sertifikat Mata Pelatihan Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi	64
Gambar 5.3 Sertifikat Mata Pelatihan Keterampilan Digital dalam Penyusunan Kebijakan.....	64
Gambar 5.1 Sertifikat Mata Pelatihan Resiliensi Diri	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	11
Gambar 1.2	Penyebab Masalah Prioritas / <i>Fishbone</i>	14
Gambar 1.3.	Peta <i>Stakeholder</i>	25
Gambar. 2.1	Konsultasi dengan Mentor	33
Gambar 2.2.	Koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Sumsel (28 Oktober 2024).....	34
Gambar 2.4.	Koordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumsel (31 Oktober 2024).....	34
Gambar 2.5.	Koordinasi dengan BPKAD Provinsi Sumsel (1 November 2024)	34
Gambar 2.6.	Rapat Persiapan dan Konsolidasi Tim Efektif	35
Gambar 2.7.	MOU dengan Kepala Dinas Kominfo	35
Gambar 2.8.	MOU dengan Kepala Dinas Dukcapil Sumsel.....	36
Gambar 2.9.	Surat Edaran.....	36
Gambar 2.10.	Draft SOP.....	37
Gambar 2.11.	SOP Aspirasi Masyarakat	38
Gambar 2.12.	Tim IT Merancang Fitur	38
Gambar 2.13.	Desain Fitur Aspirasi Masyarakat.	39
Gambar 2.14.	<i>Launching</i> Fitur Aspirasi Masyarakat.....	40
Gambar 2.15.	Sosialisasi dan Desiminasi Proyek Perubahan 3 Desember 2024	40
Gambar 2.16.	Pengolahan data aspirasi dan pengaduan masyarakat.....	41
Gambar 2.17.	Verifikasi Aspirasi dan Pengaduan masyarakat	41
Gambar 2.18.	Pemilahan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada Anggota Dewan	42
Gambar 2.19.	Laporan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan	43
Gambar 2.20.	Rapat Finalisasi Penyusunan Pedoman Aspirasi Masyarakat	44
Gambar 3.1.	Desiminasi Aspirasi Masyarakat	55
Gambar 3.2.	Publikasi di Media Sosial	56
Gambar 3.2.	Publikasi Aspirasi Masyarakat di Media Online	57
Gambar 4.1.	Pernyataan dukungan terhadap keberlangsungan proyek perubahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas DPRD, termasuk dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Masyarakat seringkali memerlukan akses yang cepat dan mudah terhadap informasi atau layanan publik, seperti permohonan informasi, pengaduan, atau penyampaian aspirasi. Peningkatan pelayanan publik, terutama dengan memanfaatkan teknologi, dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan dan meningkatkan responsivitas Sekretariat DPRD terhadap kebutuhan publik. DPRD memiliki fungsi legislatif yang krusial dalam mengawasi kinerja eksekutif dan memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sekretariat DPRD berperan dalam mendukung fungsi ini melalui pelayanan administratif. Pelayanan yang baik, cepat, dan transparan membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah, sehingga masyarakat dapat memantau dengan lebih mudah setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Proses administrasi yang lambat atau tidak efisien dapat menghambat jalannya berbagai kegiatan di DPRD, termasuk rapat, penyusunan peraturan, dan proses pengambilan keputusan. Dengan adanya peningkatan pelayanan, seperti melalui digitalisasi sistem administrasi, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, hemat biaya, dan minim kesalahan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas kerja Sekretariat DPRD.

Masyarakat mengukur kinerja lembaga publik berdasarkan seberapa baik pelayanan yang mereka terima. Dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, Sekretariat DPRD dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, serta meningkatkan citra lembaga di mata publik. Kepuasan publik yang tinggi akan berkontribusi terhadap kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Salah satu fungsi utama DPRD adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan menyerap aspirasi masyarakat. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai penunjang administrasi harus mampu mendukung



tugas ini dengan menyediakan mekanisme yang baik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. Pelayanan yang lebih baik akan membantu proses ini, memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Peningkatan pelayanan publik sering kali memerlukan peningkatan kapasitas SDM. Dengan menerapkan standar pelayanan yang lebih baik, Sekretariat DPRD dapat mendorong pengembangan kompetensi staf dan peningkatan profesionalisme dalam melayani masyarakat dan mendukung kegiatan DPRD. Kegiatan DPRD yang dibagi dalam sepuluh (10) Daftar Pemilihan (Dapil) mengharuskan anggota DPRD yang dalam hal ini dilayani oleh Sekretariat DPRD memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menyerap aspirasi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Hal yang harus ditingkatkan adalah Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkompeten akan berkontribusi langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Peningkatan pelayanan publik merupakan bagian integral dari program reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lembaga publik, perlu berperan aktif dalam upaya reformasi birokrasi dengan memberikan pelayanan yang profesional, efektif dan berintegritas. Reformasi ini penting untuk menciptakan lembaga yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan.

Tabel 1.1. Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan Secara Langsung Tahun 2021-2023

No	Tahun	Aspirasi & Pengaduan Masyarakat		Ket
		Masuk	Terealisasi	
1	2021	678	320	
2	2022	674	297	
3	2023	136	70	

Tabel 1.2. Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara Tertulis Tahun 2021-2023

No	Tahun	Aspirasi & Pengaduan Masyarakat		Ket
		Masuk	Terealisasi	
1	2021	25	16	
2	2022	57	32	



3	2023	60	41	
---	------	----	----	--

Sumber data : Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Prov. Sumsel sub bagian aspirasi

B. Profil Pelayanan Organisasi

1. Kewenangan Tugas Pokok Dan Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki kedudukan yang strategis, mengingat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk memfasilitasi tugas dan wewenang DPRD. Peran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari bagaimana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat melayani dan memfasilitasi DPRD sesuai tuntutan lingkungan administrasi publik serta lingkungan politis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan antara lain:

2. Tugas Pokok Sekretariat DPRD

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

3. Fungsi Sekretariat DPRD

Fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.



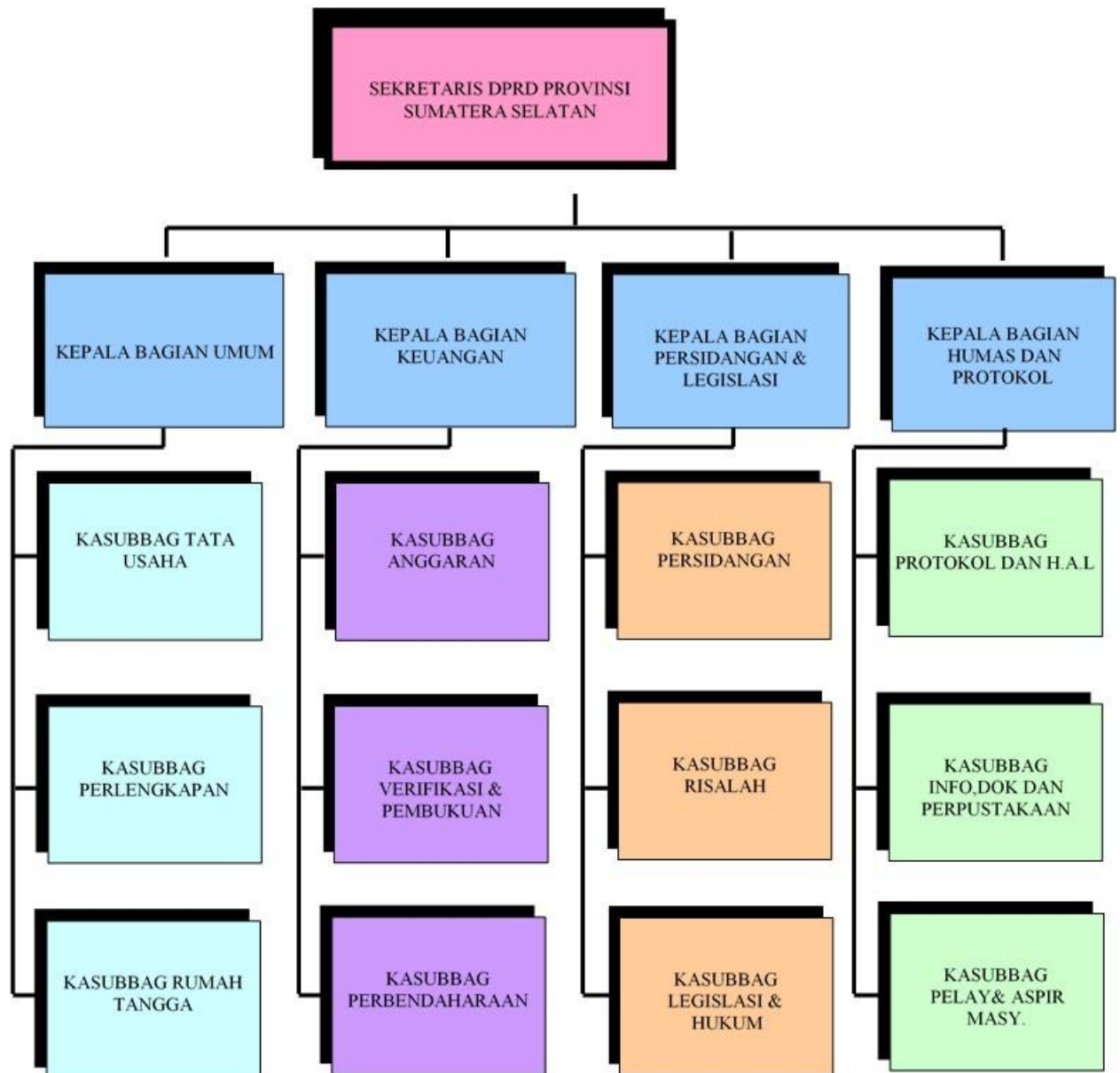
Untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai struktur/susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bagian Umum, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
 - c. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
3. Kepala Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Anggaran
 - b. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
 - c. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
4. Kepala Bagian Persidangan dan Legislasi, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Persidangan
 - b. Kepala Sub Bagian Risalah
 - c. Kepala Sub Bagian Legislasi dan Hukum
5. Kepala Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga
 - b. Kepala Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan
 - c. Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2021

4. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Strategi yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang merupakan pelaksana Sekretariat DPRD



Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 297 orang terdiri dari 96 orang PNS yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan serta 201 orang tenaga tidak tetap sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
	a	b	c	d	
GoI. IV	13	4	-	1	18
GoI. III	8	19	23	19	69
GoI. II	-	3	1	5	9
GoI. I	-	-	-	-	-
JUMLAH					96

2. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH
1	Struktural	17
2	Fungsional	3
3	Pelaksana	76
JUMLAH		96

3. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN FORMAL							JML	
	SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S-1	S-2		
PNS	-	-	16	3	-	34	42	96	
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tenaga Tetap	Tidak	2	7	88	19	2	80	3	201
JUMLAH									297

b. Sarana dan Prasarana

Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, material yang diperlukan adalah sarana dan prasarana yang menunjang operasional pelayanan tersebut.

Alat transportasi merupakan salah satu sarana yang terpenting dalam



melaksanakan tugas pelayanan, saat ini total kendaraan operasional berjumlah 109 unit terdiri atas 33 unit kendaraan roda dua dan 76 unit kendaraan roda empat. Serta peralatan elektronik lain yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan sudah cukup memadai seperti laptop, komputer, printer, brankas, kamera dan cctv.

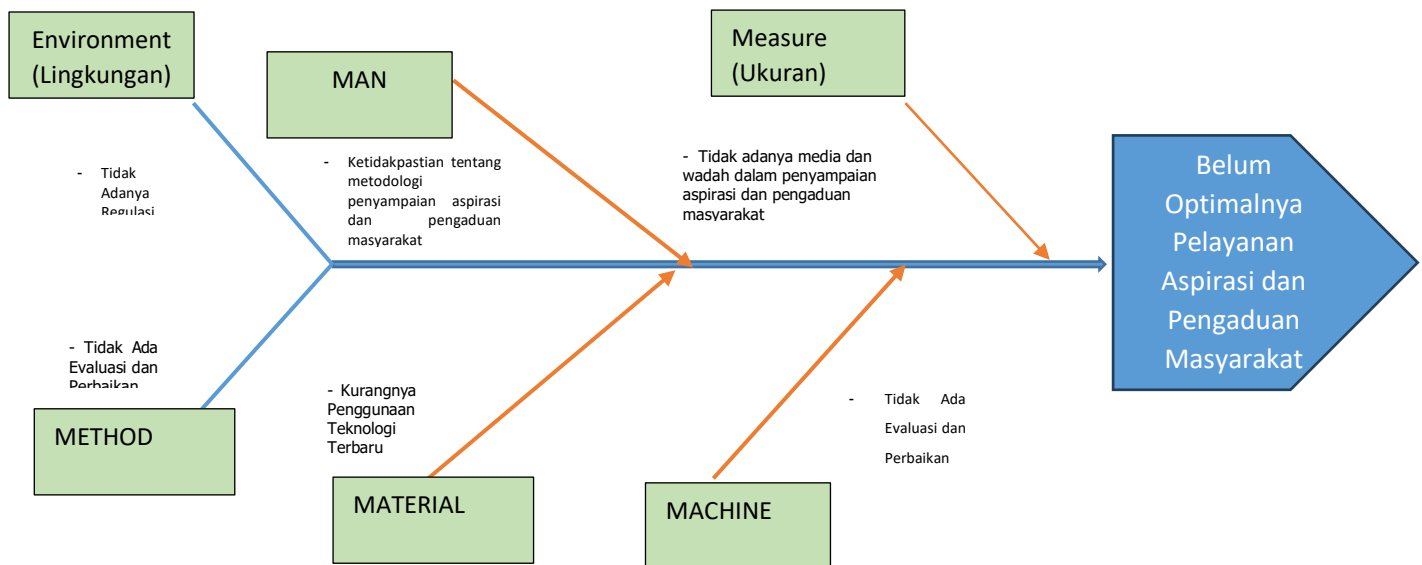
Untuk memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Jaringan Website www.dprd.sumselprov.go.id dan Radio Suara Rakyat di saluran 107,9 FM.

C. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang sering dihadapi dalam Pelayanan Publik terutama dalam penyerapan Aspirasi Masyarakat terhadap kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Masyarakat sering kali kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai saluran atau mekanisme untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi public dalam menyampaikan pendapat atau kebutuhan mereka. Prosedur administrasi yang panjang sering kali menjadi penghambat dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat. Proses ini dapat memperlambat penyampaian masukan dari masyarakat ke DPRD. Masyarakat yang berada di daerah terpencil atau wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan sering kali mengalami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi mereka karena keterbatasan akses baik secara fisik maupun teknologi.
2. Terbatasnya Sumberdaya Aparatur, sehingga sulit untuk mencapai pelayanan yang maksimal bagi Anggota DPRD terkhusus dalam pelayanan aspirasi yang efisien dan selaras. Kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur yang belum memadai sehingga belum mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai.
3. Belum optimalnya tata Kelola pengarsipan di Sekretariat DPRD karena sistem pengarsipan yang masih manual belum memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi.

Gambar I.2 Penyebab Masalah Prioritas / Fishbone



D. Strategi Penyelesaian Masalah

Peningkatan Pelayanan Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dengan memenuhi lima prinsip dasar inovasi, antara lain sebagai berikut

a. Memberi nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder

Inovasi ini memberikan nilai tambah bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Peningkatan Pelayanan Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

b. Memiliki unsur kebaruan

Bahwa inovasi ini merupakan inovasi yang baru dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, belum pernah dilakukan sebelumnya.

c. Dapat direplikasi

Inovasi ini dapat direplikasi oleh Sekretariat DPRD provinsi lain dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Di Sekretariat DPRD

d. Dapat diterapkan secara berkelanjutan

Inovasi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan dan dapat selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman

e. Dapat diterapkan secara berkelanjutan



Inovasi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan dan dapat selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman

f. Sesuai dengan nilai-nilai organisasi

Inovasi ini sesuai dengan nilai organisasi yang berlaku

Dalam menyusun strategi Peningkatan Pelayanan Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka diperlukan alat dalam menganalisisnya. Salah satu alat analisis yang sering digunakan yaitu analisis SWOT yaitu memetakan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threads).

Untuk menganalisa permasalahan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap faktor internal dan eksternal terhadap Pelayanan Publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

a. Analisis Internal

✓ Sumber Daya Manusia (SDM)

Kelebihan: Terdapat SDM yang terlatih dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mampu mengelola sistem layanan digital.

Kelemahan: Kurangnya tenaga ahli khusus di bidang digitalisasi atau minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM untuk mengoperasikan dan mengembangkan layanan digital secara optimal.

✓ infrastruktur Teknologi

Kelebihan: Sekretariat DPRD memiliki infrastruktur dasar seperti website dan fitur untuk menyebarkan informasi serta layanan publik digital.

Kelemahan: Infrastruktur yang ada mungkin belum memadai, baik dari segi kapasitas server, kecepatan akses, maupun keamanan data, sehingga bisa menghambat optimalisasi layanan.



✓ **Prosedur Birokrasi**

Kelebihan : Digitalisasi layanan dapat memotong proses birokrasi yang panjang, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Kelemahan: Adanya resistensi internal dari pegawai terhadap perubahan digital atau kurangnya pemahaman mengenai manfaat layanan digital dapat memperlambat implementasi.

✓ **Anggaran dan Dukungan Finansial**

Kelebihan: Penganggaran untuk layanan digital di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dialokasikan, terutama dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik

Kelemahan: Anggaran yang terbatas bisa menghambat pengembangan teknologi yang lebih canggih atau pembaharuan perangkat lunak dan keras

b. Analisis Eksternal

✓ **Kebutuhan Masyarakat**

Peluang: Masyarakat semakin melek teknologi dan memerlukan akses yang cepat, mudah, dan transparan terhadap informasi pemerintah. Hal ini menjadi dorongan untuk pengembangan layanan digital di DPRD.

Tantangan: Tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses internet yang memadai atau kemampuan digital yang cukup untuk memanfaatkan layanan ini.

✓ **Perkembangan Teknologi**

Peluang: Kemajuan teknologi seperti fitur mobile, media sosial, dan sistem manajemen informasi memungkinkan Sekretariat DPRD untuk menyebarluaskan informasi dan layanan dengan lebih cepat dan interaktif.

Tantangan: Teknologi yang terus berkembang memerlukan penyesuaian dan pembaruan yang konsisten. Hal ini

memerlukan investasi dan adaptasi berkelanjutan dari pihak pemerintah.

✓ **Regulasi Pemerintah**

Tantangan: Implementasi kebijakan bisa terhambat oleh keterbatasan sumber daya di daerah, serta kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan realitas di lapangan.

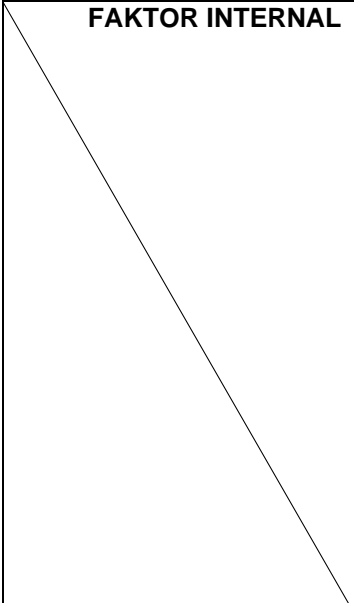
✓ **Lingkungan Kompetitif**

Peluang : Layanan digital yang inovatif bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi pemerintah daerah dalam menciptakan citra yang lebih modern dan transparan di mata masyarakat.

Tantangan: Persaingan dengan daerah lain yang sudah lebih maju dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik, serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan digital yang cepat dan tanpa hambatan.

Dari faktor internal dan eksternal yang menjadi prioritas tersebut dilakukan analisis SWOT (Strength (Kelebihan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang), dan Threat (Ancaman) dengan hasil analisis seperti berikut:

Tabel 1.6. Formulasi SWOT

FAKTOR INTERNAL	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SDM yang terlatih dalam teknologi dan informasi (TIK) yang mampu mengelola sistem layanan digital 2. Sekretariat DPRD memiliki infrastruktur dasar seperti website dan fitur untuk menyebarluaskan informasi serta layanan publik digital. 3. Digitalisasi layanan dapat memotong proses birokrasi yang panjang, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan efisiensi pelayanan 4. Pengangguran untuk layanan digital di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga ahli khusus di bidang digitalisasi atau minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM untuk mengoperasikan dan mengembangkan layanan digital secara optimal. 2. Infrastruktur yang ada mungkin belum memadai, baik dari segi kapasitas server, kecepatan akses, maupun keamanan data, sehingga bisa menghambat optimalisasi layanan. 3. Adanya resistensi internal dari pegawai terhadap perubahan digital atau kurangnya pemahaman mengenai manfaat layanan digital dapat



FAKTOR EKSTERNAL	<p>dialokasikan, terutama dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik</p>	<p>memperlambat implementasi.</p> <p>4. Anggaran yang terbatas bisa menghambat pengembangan teknologi yang lebih canggih atau pembaharuan perangkat lunak dan keras.</p>
<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat semakin melek teknologi dan memerlukan akses yang cepat, mudah, dan transparan terhadap informasi pemerintah yang menjadi dorongan untuk pengembangan layanan digital di DPRD 2. Kemajuan teknologi seperti fitur mobile, medsos dan sistem manajemen informasi dan layanan dengan lebih cepat dan interaktif. 3. Layanan digital yang inovatif bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi pemerintah daerah dalam menciptakan citra yang lebih modern dan transparan di mata masyarakat. 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SDM yang terlatih dalam TIK yang dapat menjadi dorongan untuk pengembangan layanan digital di DPRD 2. Sekretariat DPRD yang memiliki infrastruktur dasar seperti website dan fitur memungkinkan instansi ini menyebarkan informasi dan layanan dengan lebih cepat dan interaktif. 3. Digitalisasi layanan dapat memotong proses birokrasi yang panjang yang disesuaikan dengan regulasi yang ada. 4. Penganggaran untuk layanan digital di Sekretariat DPRD dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi pemerintah daerah 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga ahli khusus di bidang digitalisasi atau minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM yang harus dijadikan dorongan untuk peningkatan layanan digital di DPRD 2. Infrastruktur yang mungkin belum baik dalam segi kapasitas servis, kecepatan akses, maupun keamanan data tetapi tetap harus dikembangkan untuk menaikkan mutu teknologi 3. Adanya resistensi internal dari pegawai terhadap perubahan digital dapat memperlambat implementasi dalam regulasi lingkungan pemerintah provinsi 4. Anggaran yang terbatas bisa menghambat teknologi dalam pelayanan digital di Sekretariat DPRD tetapi untuk menciptakan citra yang lebih modern dan transparan harus tetap ditingkatkan layanan digital yang sudah diprogramkan.
<p>THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses internet yang memadai atau kemampuan digital yang cukup untuk memanfaatkan layanan ini 2. Teknologi yang terus berkembang memerlukan penyesuaian dan pembaruan yang konsisten yang dalam hal ini harus 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SDM yang terlatih dalam TIK yang mampu mengelola sistem layanan digital tetapi tidak semua kalangan masyarakat umum dapat mengakses layanan ini 2. Sekretariat DPRD memiliki infrastruktur dasar seperti website dan aplikasi kemudian teknologi harus memerlukan penyesuaian dan pembaruan yang konsisten. 3. Digitalisasi layanan dapat 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga ahli khusus di bidang digitalisasi ditambah dengan tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses menjadikan transformasi layanan digital tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 2. Teknologi yang terus berkembang memerlukan penyesuaian dan pembaruan yang konsisten kemudian harus juga memerlukan investasi dan adaptasi berkelanjutan dari pihak



<p>memerlukan investasi dan adaptasi berkelanjutan dari pihak pemerintah.</p> <p>3. Implementasi kebijakan bisa terhambat oleh keterbatasan sumberdaya di daerah, serta kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan realitas di lapangan.</p> <p>4. Persaingan dengan daerah lain yang sudah lebih maju dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik, serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan digital yang cepat dan tanpa hambatan.</p>	<p>memotong proses birokrasi yang panjang, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan efisiensi pelayanan tetapi dengan adanya keterbatasan sumberdaya terkhusus di wilayah layanan dapat menghambat implementasi kebijakan serta kesenjangan regulasi yang ideal dengan realitas di lapangan.</p> <p>4. Penganggaran untuk layanan digital aspirasi di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dialokasikan tetapi dalam persaingan dengan daerah lain yang sudah lebih maju dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik harus membuat pemda memberikan perhatian yang lebih di lingkungan pemprov lebih terkhusus lagi di OPD Sekretariat DPRD yang memang memiliki tupoksi khusus dalam pelayanan anggota DPRD.</p>	<p>pemerintah. Dengan kata lain, transformasi digital harus dilaksanakan dengan penyesuaian teknologi yang disesuaikan dengan keadaan OPD.</p> <p>3. Resistensi internal dari pegawai terhadap perubahan digital dapat memperlambat implementasi kebijakan ditambah dengan keterbatasan sumberdaya di OPD, serta kesenjangan regulasi yang ideal.</p> <p>4. Anggaran yang terbatas bisa menghambat pengembangan teknologi ditambah dengan persaingan dengan daerah lain yang sudah lebih maju dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik membuat transformasi aspirasi digital harus segera ditingkatkan sebagaimana mestinya.</p>
--	---	---

Dari isu yang menjadi prioritas tersebut dilakukan dengan yang namanya analisis SWOT (Strength (Kelebihan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang), dan Threat (Ancaman) dengan hasil analisis seperti berikut:

- Strategi S-O (Strength-Opportunity), yakni strategi yang menggunakan kekuatan oleh Sekretariat DPRD serta memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan peningkatan pelayanan publik aspirasi masyarakat melalui transformasi digital dengan hasil seperti berikut:

1. Terdapat SDM yang terlatih dalam TIK yang dapat menjadi dorongan untuk pengembangan layanan digital di DPRD
2. Sekretariat DPRD yang memiliki infrastruktur dasar seperti website dan aplikasi memungkinkan instansi ini menyebarluaskan informasi dan layanan dengan lebih cepat dan interaktif.
3. Digitalisasi layanan dapat memotong proses birokrasi yang panjang yang disesuaikan dengan regulasi yang ada.
4. Penganggaran untuk layanan digital di Sekretariat DPRD dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi pemerintah daerah



- Strategi S-T (Strength-Threat), yakni strategi yang menggunakan kekuatan oleh Sekretariat DPRD untuk menghindari ancaman dalam menciptakan peningkatan pelayanan publik aspirasi masyarakat melalui transformasi digital dengan hasil seperti berikut:
 1. Terdapat SDM yang terlatih dalam TIK yang mampu mengelola sistem layanan digital tetapi tidak semua kalangan masyarakat umum dapat mengakses layanan in
 2. Sekretariat DPRD memiliki infrastruktur dasar seperti website dan fitur kemudian teknologi harus memerlukan penyesuaian dan pembaruan yang konsisten.
 3. Digitalisasi layanan dapat memotong proses birokrasi yang panjang, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan efisiensi pelayanan tetapi dengan adanya keterbatasan sumberdaya terkhusus di wilayah layanan dapat menghambat implementasi kebijakan serta kesenjangan regulasi yang ideal dengan realitas di lapangan.
 4. Penganggaran untuk layanan digital aspirasi di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dialokasikan tetapi dalam persaingan dengan daerah lain yang sudah lebih maju dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik harus membuat pemda memberikan perhatian yang lebih di lingkungan pemprov lebih terkhusus lagi di OPD Sekretariat DPRD yang memang memiliki tupoksi khusus dalam pelayanan anggota DPRD.
- Strategi W-O (Weakness-Opportunity), adalah strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki serta menghindari ancaman yang dapat terjadi dari adaptasi petani yang ingin dilakukan dalam menciptakan peningkatan pelayanan publik aspirasi masyarakat melalui transformasi digital dengan hasil seperti berikut:
 1. Kurangnya tenaga ahli khusus di bidang digitalisasi atau minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM yang harus dijadikan dorongan untuk peningkatan layanan digital di DPRD
 2. Infrastruktur yang mungkin belum baik dalam segi kapasitas servis, kecepatan akses, maupun keamanan data tetapi tetap harus dikembangkan untuk menaikkan mutu teknologi
 3. Adanya resistensi internal dari pegawai terhadap perubahan digital dapat



memperlambat implementasi dalam regulasi lingkungan pemerintah provinsi

4. Anggaran yang terbatas bisa menghambat teknologi dalam pelayanan digital di Sekretariat DPRD tetapi untuk menciptakan citra yang lebih modern dan transparan harus tetap ditingkatkan layanan digital yang sudah diprogramkan.

- Strategi W-T (Weakness-Threat), adalah strategi meminimalkan kelemahan yang ada untuk menghindari ancaman yang dapat terjadi dari adaptasi petani yang ingin dilakukan dalam menciptakan peningkatan pelayanan publik aspirasi masyarakat melalui transformasi digital dengan hasil seperti berikut:

1. Kurangnya tenaga ahli khusus di bidang digitalisasi ditambah dengan tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses menjadikan transformasi layanan digital tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

2. Teknologi yang terus berkembang memerlukan penyesuaian dan pembaruan yang konsisten kemudian harus juga memerlukan investasi dan adaptasi berkelanjutan dari pihak pemerintah. Dengan kata lain, transformasi digital harus dilaksanakan dengan penyesuaian teknologi yang disesuaikan dengan keadaan OPD.

3. Resistensi internal dari pegawai terhadap perubahan digital dapat memperlambat implementasi kebijakan ditambah dengan keterbatasan sumberdaya di OPD, serta kesenjangan regulasi yang ideal.

4. Anggaran yang terbatas bisa menghambat pengembangan teknologi ditambah dengan persaingan dengan daerah lain yang sudah lebih maju dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik membuat transformasi aspirasi digital harus segera ditingkatkan sebagaimana mestinya.

Dalam strategi yang sudah dijabarkan di atas bila dikaitkan dengan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik aspirasi masyarakat melalui transformasi digital bahwa keempat strategi tersebut baik S-O, S-T, W-O, W-T memiliki kaitan masing-masing dalam e-aspirasi yang diinginkan karena dengan Strength (Kelebihan) yang ada sebagai penentu faktor internal bisa dikolaborasikan dengan Opportunity (Peluang) yang ada dan menghindari Threat (Ancaman) yang ada sebagai penentu faktor eksternal dalam melakukan inovasi yang akan dilakukan, kemudian dengan Weakness (Kelemahan) yang ada sebagai penentu faktor internal lainnya bila dikalobrasikan dengan



Opportunity (Peluang) dan Threat (Ancaman) akan meminimalkan kelemahan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada yang menghindari ancaman yang mungkin akan terjadi nanti sebagai penentu faktor eksternal dari inovasi tersebut.

Identifikasi isu yang ada pada masalah peningkatan pelayanan publik dalam pengelolaan aspirasi masyarakat melalui transformasi digital ini adalah berhubungan dengan masyarakat langsung, teknologi sebagai fasilitator dan sumberdaya aparatur sebagai pendukung fasilitator tersebut harus memiliki saling keterkaitan masing-masing. Untuk prioritas isu yang ditangani adalah masyarakat sering kali kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai saluran atau mekanisme untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi publik dalam menyampaikan pendapat atau kebutuhan mereka. Prosedur administrasi yang panjang sering kali menjadi penghambat dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat.

1. Pentahapan Proyek Perubahan

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka disusun target capaian dalam 3 fase yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dengan kegiatan sebagai berikut:

Tahapan Jangka Pendek

1. Advokasi ke stakeholder internal/eksternal
2. Pembentukan tim kerja
3. Membangun komitmen Bersama
4. Penyusunan surat edaran
5. Pembuatan SOP
6. Pembuatan rancangan aplikasi
7. Sosialisasi dan desiminasi
8. Implementasi
9. Penyusunan konsep pedoman aspirasi dan pengaduan masyarakat
10. Evaluasi dan pelaporan

Tahapan Jangka Menengah

1. Pengembangan inovasi
2. Pembentukan wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat

3. Implementasi aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dapat dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Tahapan Jangka Panjang

Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel

Tabel 1.7. Tahapan Kegiatan

Milestone	Kegiatan	Output dan Evidence	Waktu
Advokasi ke stakeholder internal/eksternal	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan rencana pelaksanaan proyek perubahan kepada Sekda b. melakukan konsultasi dengan mentor untuk persiapan pelaksanaan proyek perubahan c. memimpin rapat internal untuk penjelasan proyek perubahan d. melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal 	Adanya dukungan stakeholder internal dan eksternal terhadap proyek perubahan	Minggu I
Pembentukan tim kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan SK tim kerja b. rapat persiapan dan konsolidasi tim kerja 	SK tim kerja Undangan hadir, bahan rapat, notulen	Minggu II
Membangun komitmen Bersama	<ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan dan konsultasi pelaksanaan kepada pimpinan OPD b. melakukan Kerjasama atau sharing dengan OPD lain 	Laporan Kesepakatan bersama	Minggu III
Penyusunan surat edaran	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan draf surat edaran b. persetujuan, penandatanganan surat edaran 	Surat edaran	Minggu II
Pembuatan SOP	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan draf SOP b. pembahasan dan finalisasi draf SOP c. penetapan SOP 	Dokumen penetapan SOP	Minggu II
Pembuatan rancangan penambahan fitur	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin diskusi untuk membahas rancangan penambahan fitur b. proses perancangan c. proses pembangunan sistem dan domain d. finishing e. uji coba f. Menyusun manual book 	Desain fitur	Minggu II, III, IV
Sosialisasi dan desiminasi	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat materi sosialisasi dan desiminasi b. Launching 	Undangan daftar hadir dan notulen sosialisasi dan launching	Minggu II, III
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> a. pengolahan data aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi b. mengarahkan tim kerja melakukan verifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat c. pemilahan aspirasi dan 	Data aspirasi dan pengaduan masyarakat Laporan monitoring dan evaluasi	Minggu II, III, IV



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

	<p>pengaduan masyarakat kepada Anggota Dewan</p> <p>d. penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Anggota Dewan</p> <p>e. melakukan evaluasi hasil kegiatan</p> <p>f. Menyusun pelaporan</p>		
Penyusunan konsep pedoman aspirasi dan pengaduan masyarakat	<p>a. melakukan rapat koordinasi</p> <p>b. Menyusun draf konsep</p> <p>c. membahas finalisasi draf konsep</p> <p>d. menetapkan konsep</p>	Undangan Daftar hadir Bahan rapat Notulen	Minggu II, III
Evaluasi dan pelaporan	<p>a. melaksanakan evaluasi</p> <p>b. Menyusun pelaporan</p>	Dokumen evaluasi Dokumen pelaporan kegiatan	Minggu IV

Jangka Menengah

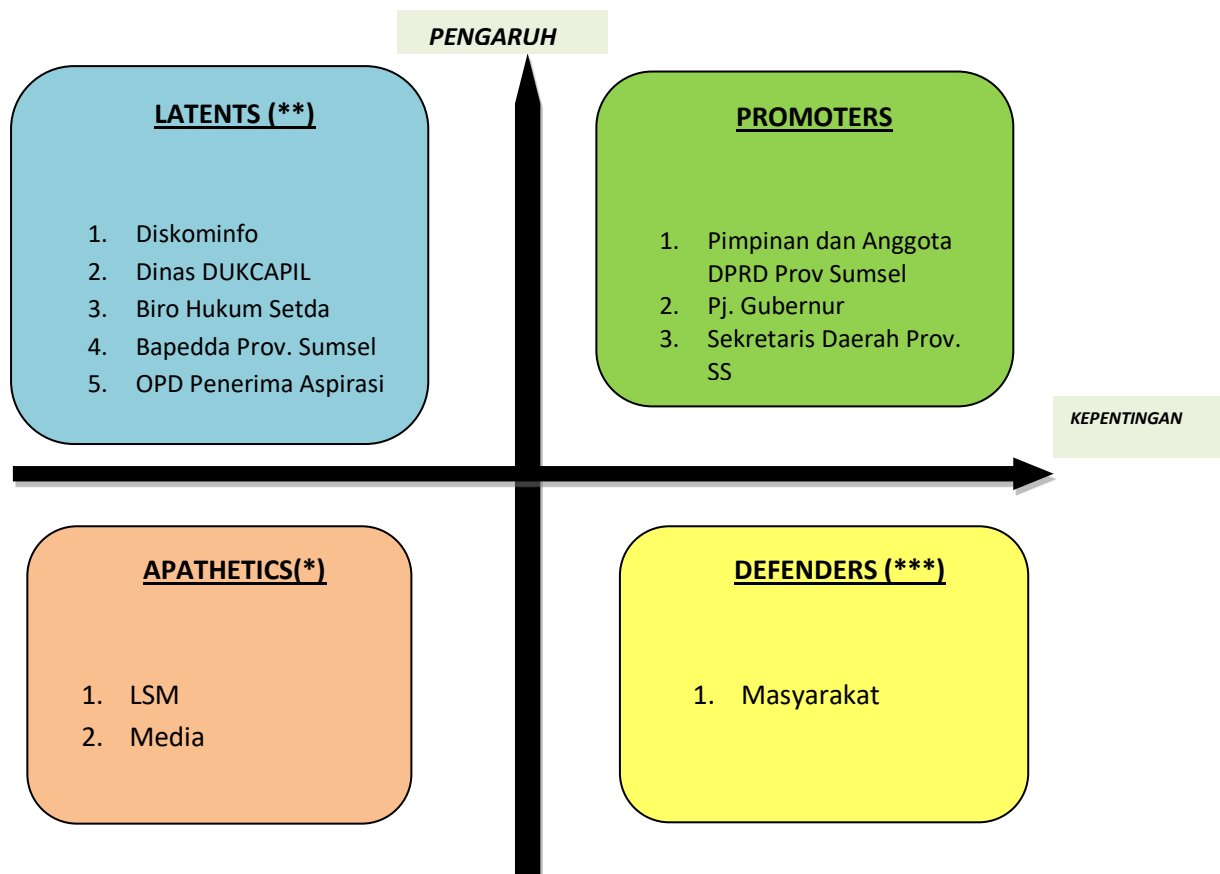
Milestone	Kegiatan	Waktu
Pengembangan inovasi	<p>a. melakukan Kerjasama dengan OPD lain untuk verifikasi data kependudukan masyarakat, untuk peningkatan keamanan data dan menangkal aspirasi dan pengaduan masyarakat hoax dari masyarakat</p> <p>b. melakukan pengembangan dan pemeliharaan layanan pada aplikasi</p>	1 tahun
Pembentukan wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat	<p>a. membangun kesepakatan Bersama</p> <p>b. pengolahan data aspirasi dan pengaduan masyarakat yang belum terjangkau jaringan internet yang masuk di daerah</p> <p>c. tindak lanjut penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat ke DPRD</p>	1 tahun
Implementasi aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dapat dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Selatan	<p>a. pengolahan data aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi</p> <p>b. verifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat</p> <p>c. Klasifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat</p> <p>d. Penyampaian dan penginputan aspirasi dan pengaduan masyarakat</p> <p>e. Rapat koordinasi dengan DPRD dalam perumusan pokok-pokok pikiran berdasarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat</p> <p>f. Melakukan evaluasi hasil kegiatan</p>	1 tahun

Jangka Panjang

Milestone	Kegiatan	Waktu
Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel	a. Rapat-rapat koordinasi Bersama OPD dan stakeholder terkait b. Implementasi pokok pikiran DPRD dalam RKPD c. melakukan evaluasi hasil kegiatan	1 tahun

2. Pemetaan Stakeholder

Masing-masing stakeholder memiliki peran dan pengaruh yang berbeda-beda terhadap proyek perubahan sesuai dengan besarnya kepentingan terhadap kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar rencana pemetaan sebagai berikut



Gambar 1.3. Peta Stakeholder



3. Strategi Komunikasi

Adapun strategi komunikasi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan stakeholder Promotors :
Menerapkan keterbukaan dalam komunikasi yang konstruktif yaitu menjelaskan penetapan tujuan, pemberian tugas, penjadwalan pekerjaan, pemcahan masalah, diskusi dan sebagainya
- b. Dengan stakeholder Defenders :
 - Mengadakan pertemuan, memotivasi dan berdialog langsung
 - Meyakinkan tujuan jangka panjang yang akan dicapai melalui pelaksanaan proyek perubahan
- c. Dengan stakeholder aphetetics
 - Memberikan informasi secara terbatas
 - Mencari kesepakatan bersama atas perbedaan pandangan
- d. Dengan stakeholder latens
Memberikan informasi dengan jelas, memotovasi agar senantiasa terlibat dalam kegiatan

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan proyek perubahan ini dibagi menjadi tujuan jangka pendek, menengah, dan Panjang.

a. Tujuan Jangka Pendek (2 bulan)

Tersusunnya kebijakan yang mengatur dan mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi selama 2 (dua) bulan, Adapun rinciannya adalah:

- ✓ Tersusunnya surat edaran tentang pedoman pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- ✓ Terbangunnya sistem aplikasi yang memberikan layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- ✓ Tersedianya SOP yang mengatur mekanisme dan tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.



- b. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan)
 - ✓ Tersedianya pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat.
 - ✓ Terbentuknya wadah aspirasi penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara klasikal bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang belum terlayani dengan optimal.
- c. Tujuan Jangka Panjang
 - ✓ Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari proyek perubahan ini adalah, sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
 - ✓ Mewujudkan tata Kelola yang responsif, akuntabel, dan transparan dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat
 - ✓ Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi
 - ✓ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - ✓ Meningkatkan indeks demokrasi
2. Sekretariat DPRD
 - ✓ Kemudahan bagi Sekretariat DPRD dalam melakukan pelayanan dan pengadministrasian aspirasi dan pengaduan masyarakat.
 - ✓ Membantu Sekretariat DPRD dalam memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan publik, sehingga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
 - ✓ Membuat proses pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga masyarakat merasa lebih terlayani dan direspon oleh pemerintah.
3. DPRD Provinsi Sumatera Selatan
 - ✓ Menjadi sumber informasi dan masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
 - ✓ Membantu DPRD dalam menemukan isu-isu actual yang menjadi perhatian utama masyarakat.
 - ✓ Memudahkan DPRD dalam menyerap aspirasi dan pengaduan



masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- ✓ Mengusulkan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Organisasi Perangkat Daerah

- ✓ Dapat melakukan perbaikan dalam manajemen dan pelaksanaan program-program yang mereka jalankan sehingga membantu menentukan arah kebijakan pembangunan agar tepat sasaran.
- ✓ Dapat mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat.
- ✓ Membantu OPD dalam memperkuat hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.
- ✓ Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

5. Masyarakat

- ✓ Memudahkan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat secara mudah, cepat, efektif dan efisien.
- ✓ Aspirasi dan pengaduan masyarakat langsung diteruskan kepada DPRD sehingga tidak terabaikan dan adanya kepastian tindak lanjut.
- ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses keputusan publik.

F. *Output dan Outcome*

1. *Output*

Secara keseluruhan, keluaran (output) jangka pendek dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Surat edaran tentang pedoman pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Tersusunnya SOP penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- c. Tersusunnya konsep wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang belum terjangkau jaringan internet.

2. *Outcome*

Sedangkan pada hasil (outcome) yang diharapkan setelah hadirnya proyek perubahan ini adalah:

- a. Pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat menjadi lebih efektif,



efisien, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses keputusan publik.

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS

A. Diskripsi Pelaksanaan Tahapan Rencana Strategis

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka disusun target capaian dalam 3 fase yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dengan kegiatan sebagai berikut:

Jangka Pendek (2 Bulan)

Milestone	Kegiatan	Output dan Evidence	Waktu
Advokasi ke stakeholder internal / eksternal	a. melaporkan rencana pelaksanaan proyek perubahan kepada Sekda	Adanya dukungan stakeholder internal dan eksternal terhadap proyek perubahan	21 Oktober 2024
	b. melakukan konsultasi dengan mentor untuk persiapan pelaksanaan proyek perubahan		24 Oktober 2024
	c. memimpin rapat internal untuk penjelasan proyek perubahan		25 Oktober 2024
	d. melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal		28 Oktober 2024
Pembentukan tim kerja	a. Menetapkan SK tim kerja	SK tim kerja, Undangan hadir, bahan rapat, notulen	01 November 2024
	b. Rapat persiapan dan konsolidasi tim kerja		04 November 2024
Membangun komitmen Bersama	a. Melaporkan dan konsultasi pelaksanaan kepada Sekda b. melakukan Kerjasama atau sharing dengan OPD lain	Laporan kesepakatan bersama (MoU) Foto	06-08 November 2024
Penyusunan surat edaran	a. penyusunan draf surat edaran, b. persetujuan, penandatanganan surat edaran	Surat edaran	11 November 2024
Pembuatan SOP	a. penyusunan SOP b. penetapan SOP	Draf SOP Dokumen penetapan SOP yang ditandatangani Sekretaris DPRD	12-14 November 2024
Pembuatan rancangan	a. Memimpin diskusi untuk membahas	Undangan Rapat	18 November 2024



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

penambahan fitur	<p>rancangan fitur</p> <p>b. Proses pengembangan</p> <p>c. proses pengembangan sistem dan domain</p> <p>d. uji coba</p> <p>e. Menyusun manual book</p>	<p>Desain Fitur Aspirasi Foto</p> <p>Data hasil uji coba Manual book</p>	<p>19-21 November 2024</p> <p>22-25 November 2024</p> <p>26-27 November 2024</p> <p>28-29 Desember 2024</p>
Sosialisasi dan desiminasi	<p>a. Membuat jadwal sosialisasi dan desiminasi</p> <p>b. Sosialisasi Pengembangan Aplikasi Aspirasi</p>	<p>Undangan, daftar hadir dan video launching</p>	<p>02-04 Desember 2024</p>
Implementasi	<p>a. Pengolahan data aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk melalui website</p> <p>b. Mengarahkan tim kerja melakukan verifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat</p> <p>c. Pemilahan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Anggota Dewan</p> <p>d. Penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Anggota Dewan</p> <p>e. Melakukan evaluasi hasil kegiatan</p>	<p>Data aspirasi dan pengaduan masyarakat</p> <p>Foto verifikasi</p> <p>Foto penyampaian Aspirasi kepada Pimpinan Dewan</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi</p>	<p>05 Desember 2024</p> <p>06 Desember 2024</p> <p>07 Desember 2024</p> <p>08 Desember 2024</p> <p>11-16 Desember 2024</p>
Penyusunan pedoman penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat	<p>a. melakukan rapat koordinasi</p> <p>b. Menyusun konsep penyampaian aspirasi</p>	<p>Pedoman Penyampaian Aspirasi</p>	<p>13 Desember 2024</p> <p>14 Desember 2024</p>

Jangka Menengah

Milestone	Kegiatan	Waktu
Pengembangan inovasi	<p>a. Melakukan Kerjasama dengan OPD lain untuk verifikasi data kependudukan masyarakat, untuk peningkatan keamanan data dan menangkal aspirasi dan pengaduan</p>	1 Tahun



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

	<p>masyarakat hoax dari masyarakat</p> <p>b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan layanan pada</p>	
Pembentukan wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat	<p>a. Membangun kesepakatan Bersama</p> <p>b. Pengolahan data aspirasi dan pengaduan masyarakat yang belum terjangkau jaringan internet yang masuk di daerah</p> <p>c. Tindak lanjut penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat ke DPRD</p>	1 Tahun
Implementasi aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dapat dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Selatan	<p>a. Pengolahan data aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi</p> <p>b. Verifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat</p> <p>c. Klasifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat</p> <p>d. Penyampaian dan penginputan aspirasi dan pengaduan masyarakat</p> <p>e. Rapat koordinasi dengan DPRD dalam perumusan pokok-pokok pikiran berdasarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat</p> <p>f. Melakukan evaluasi hasil kegiatan</p>	1 Tahun

Jangka Panjang

Milestone	Kegiatan	Waktu
Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel	<p>a. Rapat-rapat koordinasi Bersama OPD dan stakeholder terkait</p> <p>b. Implementasi pokok pikiran DPRD dalam RKPD</p> <p>c. Melakukan evaluasi hasil kegiatan</p>	1 Tahun

Dengan rincian jadwal dan capaian hasil aksi perubahan sebagai berikut:

1. Advokasi ke stakeholder internal / eksternal

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 untuk menyampaikan rencana implementasi aksi perubahan yang akan dilaksanakan dan diharapkan mendapatkan koreksi, masukan dan dukungan terhadap aksi yang akan dilaksanakan dari Mentor. Aksi Perubahan ini harapannya dapat memberikan nilai tambah dalam peningkatan implementasi Layanan aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan konsultasi ini, mentor memberikan masukan dan arahan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam tahapan aksi perubahan ini. Mentor juga memberikan dukungan penuh kepada *project leader*, agar implementasi aksi perubahan ini dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan hasil yang terbaik.



Gambar. 2.1
Konsultasi dengan Mentor

Selanjutnya Project Leader melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait selaku inisiator pembuatan proyek perubahan ini dengan stakeholder terkait antara lain Biro Hukum Provinsi Sumsel, Bappeda Provinsi Sumsel, BPKAD Provinsi Sumsel



Gambar 2.2. Koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Sumsel (28 Oktober 2024)



Gambar 2.4. Koordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumsel (31 Oktober 2024)



Gambar 2.5. Koordinasi dengan BPKAD Provinsi Sumsel (1 November 2024)

2. Pembentukan tim kerja

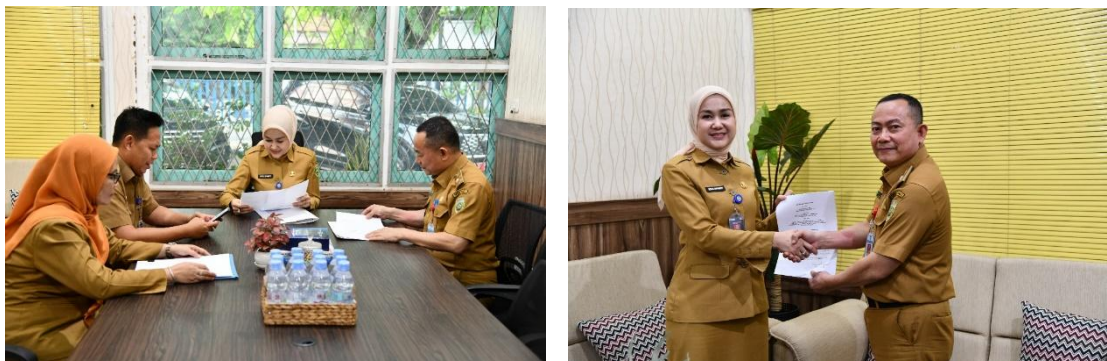
Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan Rapat di sekretariat DPRD pada tanggal 04 November 2024 terkait rancangan tim efektif proyek perubahan.



Gambar 2.6. Rapat Persiapan dan Konsolidasi Tim Efektif

3. Membangun komitmen Bersama

Pemegang proyek perubahan dalam hal ini Sekretaris DPRD melakukan kerjasama (MOU) serta sharing dengan OPD yang terkait dengan proyek perubahan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 05 dan 08 November 2024.

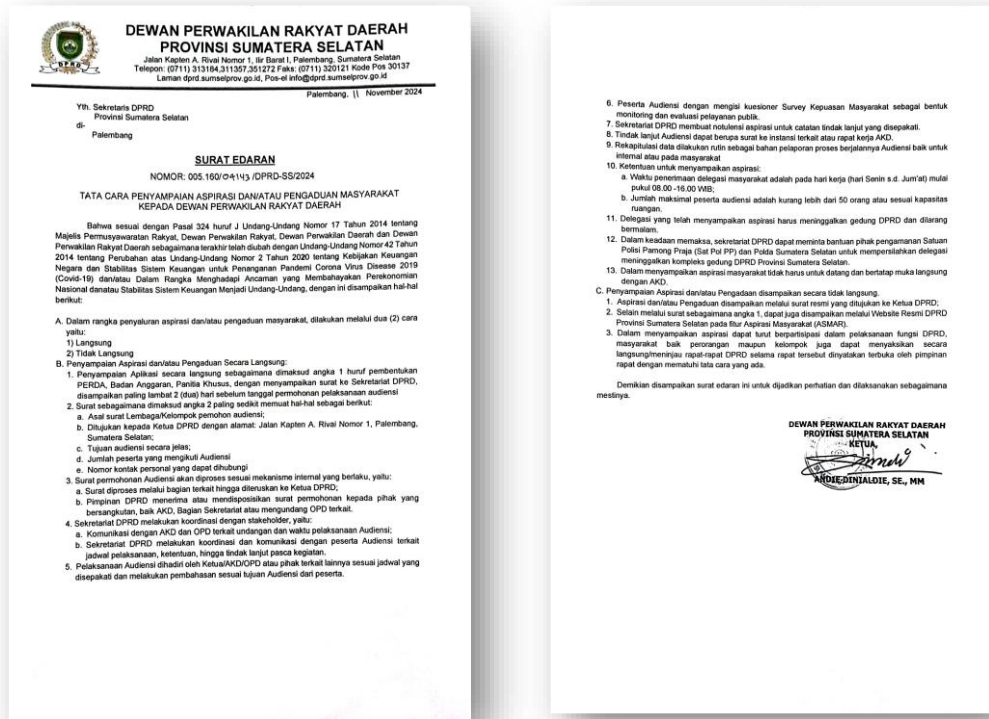


Gambar 2.7. MOU dengan Kepala Dinas Kominfo



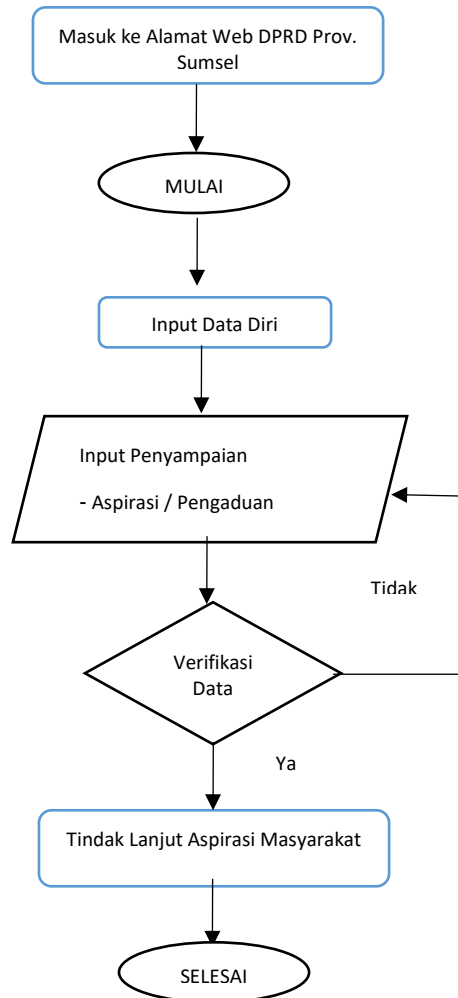
Gambar 2.8. MOU dengan Kepala Dinas Dukcapil Sumsel

4. Penyusunan surat edaran

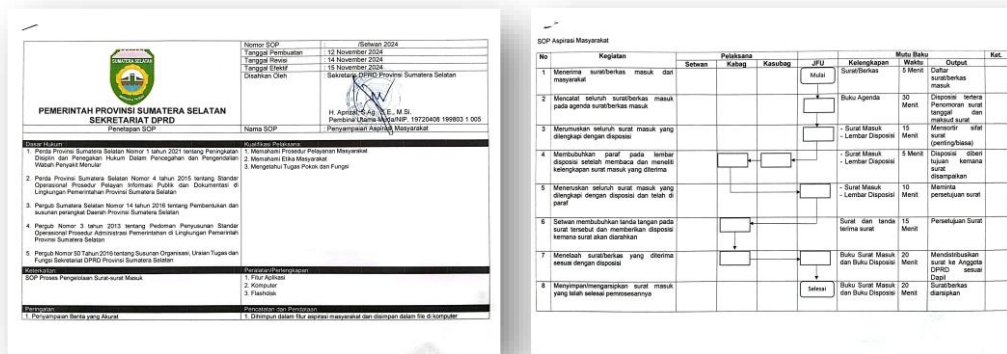


Gambar 2.9. Surat Edaran

5. Pembuatan SOP



Gambar 2.10. Draft SOP



Gambar 2.11. SOP Aspirasi Masyarakat

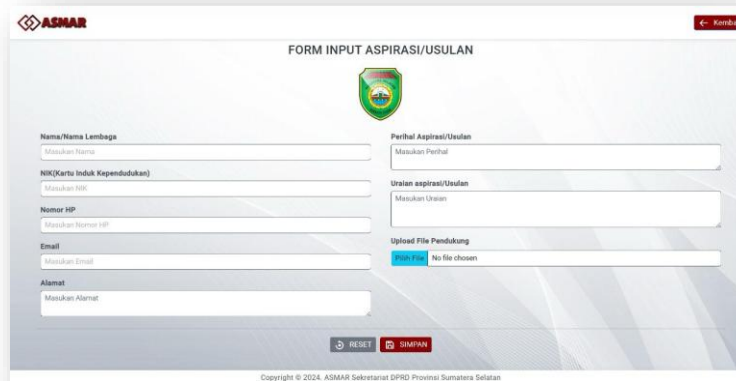
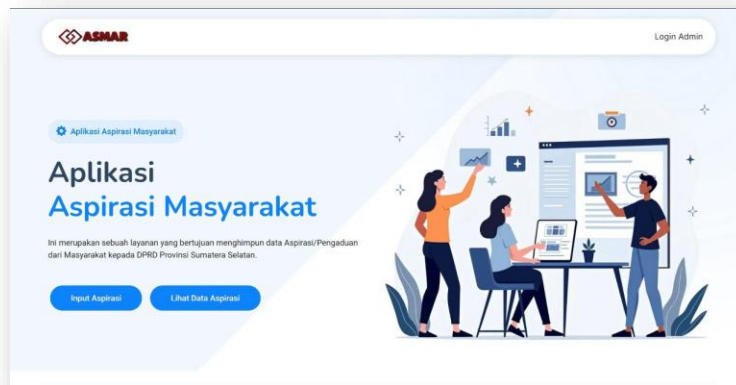
7. Pembuatan rancangan aplikasi



Gambar 2.12. Tim IT Merancang aplikasi



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN



Gambar 2.13. Desain Fitur Aspirasi Masyarakat.





Gambar 2.14. Launching Fitur Aspirasi Masyarakat.

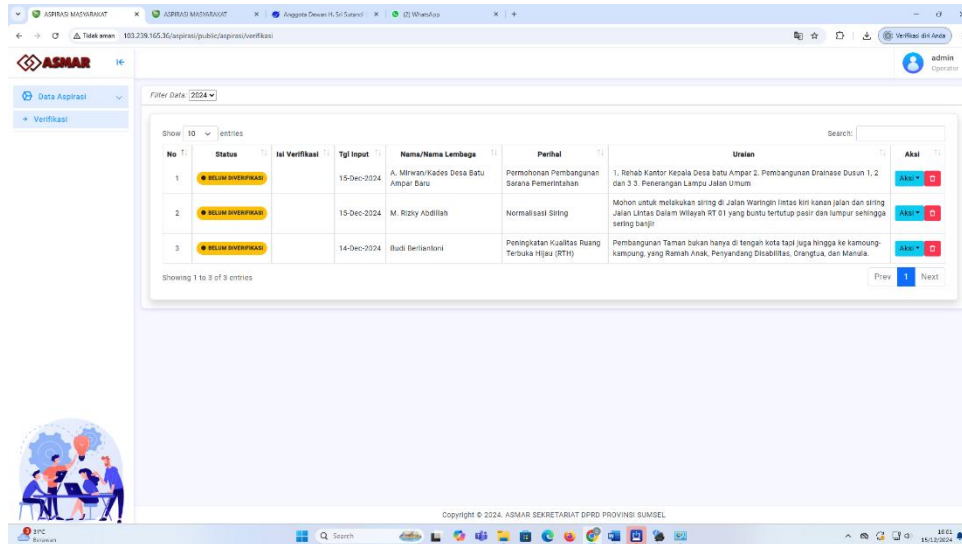
8. Sosialisasi dan desiminasi



Gambar 2.15. Sosialisasi dan Desiminasi Proyek Perubahan 3 Desember 2024

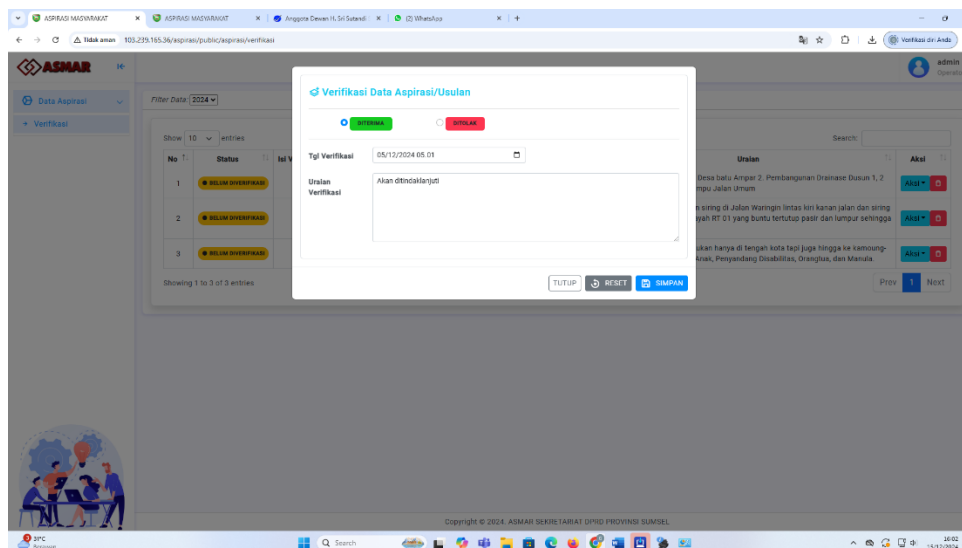
9. Implementasi

- a. Pengolahan data aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi



Gambar 2.16. Pengolahan data aspirasi dan pengaduan masyarakat

- b. Mengarahkan tim kerja melakukan verifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat



Gambar 2.17. Verifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat

c. Pemilahan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Anggota Dewan

No	Status	Tgl Verifikasi	Tgl Input	Nama/Name Lembaga	Perihal	Uraian	Aksi
1	Akan ditindaklanjuti	15-Dec-2024	15-Dec-2024	A. Mirwan/Kades Desa Btu Ampar Baru	Pemohonan Pembangunan Sarana Pemerintahan	1. Rehab Kantor Kepala Desa batu Ampar 2. Pembangunan Drainase Dusun 1, 2 dan 3 3. Penerangan Lampu Jalan Umum	Aksi
2	Akan ditindaklanjuti	15-Dec-2024	15-Dec-2024	M. Rizky Abdillah	Normalisasi Siring	Mohon urufus melakukan siring di Jalan Warangh limas sisi kanan jalan dan siring Jalan Lintas Dalam Wilayah RT 03 yang bantu tertutup pasir dan lumpur sehingga sering banjir	Aksi
3	Akan ditindaklanjuti	14-Dec-2024	14-Dec-2024	Budi Berliantoni	Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Taman bahan hanya di Ingkoh kite tapi juga hingga ke kampong-kampung, yang Ramah Anak, Penyandang Disabilitas, Orangtua, dan Manula.	Aksi



Gambar 2.18. Pemilahan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Anggota Dewan

- d. Penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Anggota Dewan



Gambar 2.19. Laporan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

e. Melakukan evaluasi hasil kegiatan



Gambar 2.20. Rapat Finalisasi Penyusunan Pedoman Aspirasi Masyarakat

10. Penyusunan konsep pedoman aspirasi dan pengaduan masyarakat

PROSEDUR PENGGUNAAN FITUR MASYARAKAT (ASMAR)

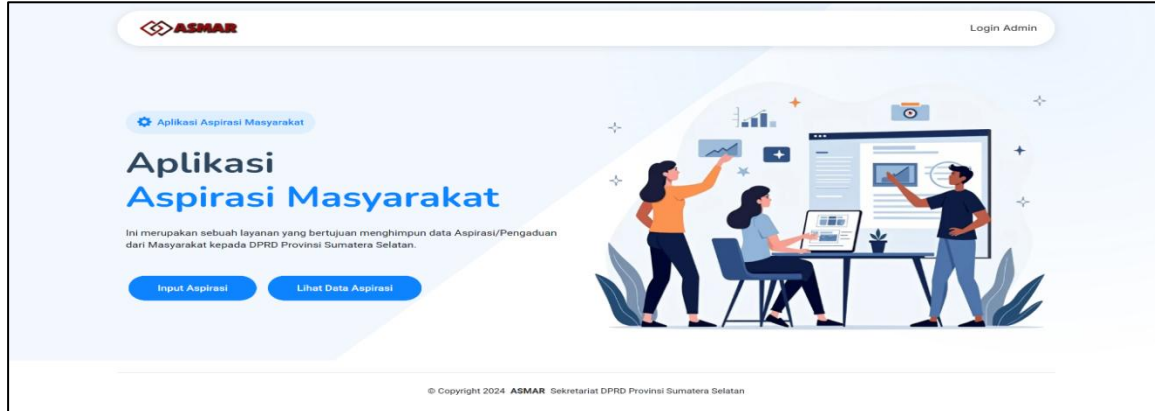
PADA WEBSITE DPRD PROV. SUMSEL (<https://dprd.sumselprov.go.id/>)

ASMAR merupakan salah satu bagian dari fitur dari website DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan link <http://103.239.165.36/aspirasi/public/>. Fitur ASMAR pada dasarnya memiliki 2 (dua) bagian pokok pengolah data, yakni

1. Halaman Utama
2. Halaman Administrator dan Verifikator

Berikut ini penjelasan masing-masing bagian pokok pengolah data pada ASMAR.

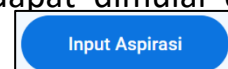
1. HALAMAN UTAMA



Halaman Utama ini berisikan penjelasan maksud dari fitur ASMAR dan tombol-tombol menu untuk masyarakat umum memulai menginput aspirasi atau pun usulannya. Pada halaman utama ini juga terdapat tombol login admin.

1.1. Menu Input Aspirasi

Untuk memulai memasukan Aspirasi atau Usulan dapat dimulai dengan menekan tombol input aspirasi, berikut ini tombolnya



Setelah tombol input ditekan maka fitur akan menampilkan halaman input data aspirasi, seperti dibawah ini.

Copyright © 2024. ASMAR Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Halaman input digunakan untuk menyimpan data aspirasi atau usulan yang di input, apabila data aspirasi berhasil disimpan maka akan menampilkan halaman histori keberhasilan input, seperti dibawah ini

Copyright © 2024. ASMAR Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

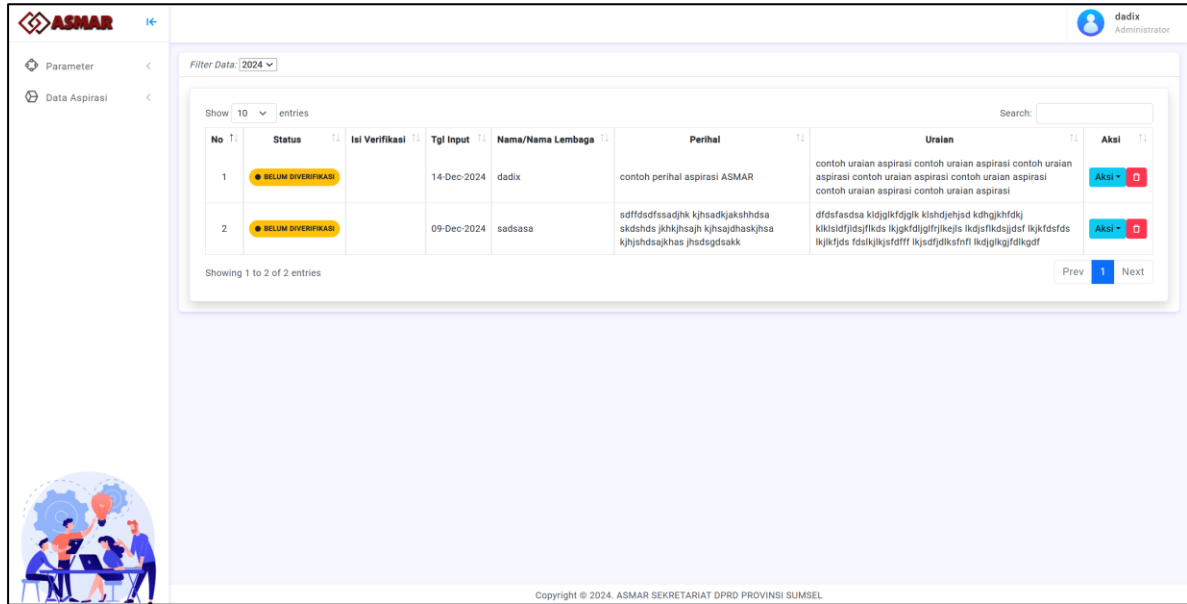
1.2. Menu Lihat Data Aspirasi

Untuk melihat data-data aspirasi yang telah masuk dan juga status verifikasi masyarakat umum dapat menekan tombol “Lihat Data Aspirasi”

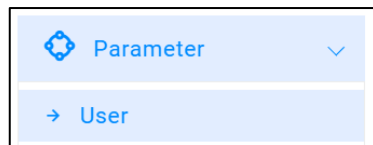
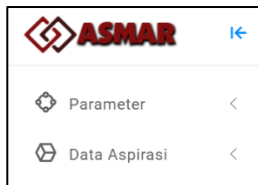
Lihat Data Aspirasi

Setelah menekan tombol tersebut maka fitur akan menampilkan halaman data aspirasi seperti berikut ini.

Setelah memasukan Username dan Password yang benar maka fitur ASMAR akan menampilkan halaman admin seperti berikut ini.



Pada halaman ini terdapat menu Parameter dan Data Aspirasi



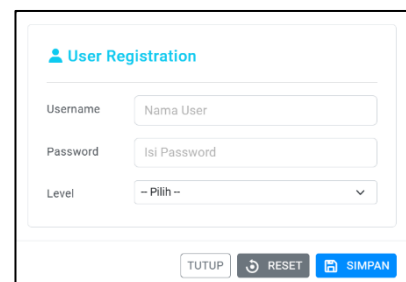
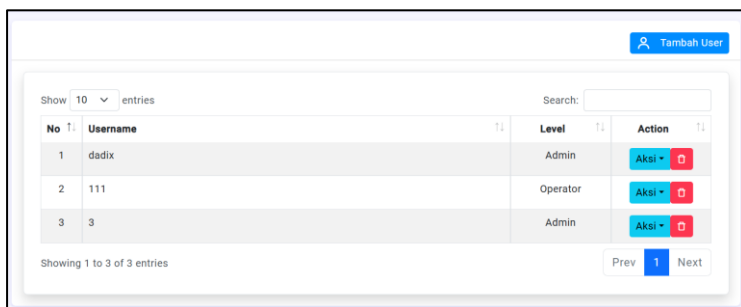
- ❖ Pada menu Parameter terdapat mmenu User untuk mengatur data user pada fitur ASMAR



- ❖ Pada menu Data Aspirasi terdapat menu Verifikasi untuk membuat verifikasi atas data yang telah di input oleh masyarakat

2.1. Menu Parameter -> User

Menu ini akan menampilkan data user yang terdaftar sebagai Admin atau Verifikator, pada menu ini Admin dapat menambah, merubah serta menghapus user untuk fitur ASMAR ini. Berikut ini tampilannya

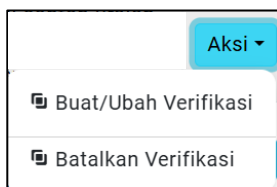


2.2. Menu Data Aspirasi -> Verifikasi

Pada menu ini fitur ASMAR akan menampilkan tabel data aspirasi yang telah diinput oleh masyarakat dan siap untuk dilakukan verifikasi, berikut ini tampilannya.

No	Status	Isi Verifikasi	Tgl Input	Nama/Nama Lembaga	Perihal	Uraian	Aksi
1	● BELUM DIVERIFIKASI		14-Dec-2024	dadix	contoh perihal aspirasi ASMAR	contoh uraian aspirasi contoh uraian aspirasi contoh uraian aspirasi contoh uraian aspirasi	Aksi
2	● BELUM DIVERIFIKASI		09-Dec-2024	sadsasa	sdfdsfssadjhk kjhsadjkshhdhsa skdshds jkhkjsahj kjhsajdhaskjhsa kjhshdsajkhas jhsdsgdsakk	dfdsfasdsa kjdjkfdjgk kishdjhjshd kdngkjhdjk kklslsdfjdsjfkds lkjgkfdjgfrjkejs lkajsfkdsjdsf lkjkdfsds lkjkdjds fdsjkjstfdrff lkjsdfjksfrfi lkajgkfdlkgdf	Aksi

Untuk mulai membuat verifikasi yakni dengan cara menekan tombol “Aksi”



- ❖ Pilih “Buat/Ubah Verifikasi” untuk memverifikasi data aspirasi
- ❖ Pilih “Batalkan Verifikasi” untuk membatalkan verifikasi



- ❖ Pilih option Diterima atau Ditolak untuk status Aspirasi
- ❖ Lengkapi semua kolom tanggal dan uraian verifikasi nya

Setelah data aspirasi diverifikasi dan disimpan maka pada halaman utama khususnya bagian “Lihat Data Aspirasi” juga menampilkan status dan uraian verifikasinya sesuai yang dilakukan oleh verifikator.

11. Evaluasi dan pelaporan

B. Capaian Manfaat Jangka Pendek*)

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

- ✓ Mewujudkan tata Kelola yang responsif, akuntabel, dan transparan dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat
- ✓ Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi
- ✓ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat



- ✓ Meningkatkan indeks demokrasi
2. Sekretariat DPRD
 - ✓ Kemudahan bagi Sekretariat DPRD dalam melakukan pelayanan dan pengadministrasian aspirasi dan pengaduan masyarakat.
 - ✓ Membantu Sekretariat DPRD dalam memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan publik, sehingga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
 - ✓ Membuat proses pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga masyarakat merasa lebih terlayani dan direspon oleh pemerintah.
 3. DPRD Provinsi Sumatera Selatan
 - ✓ Menjadi sumber informasi dan masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
 - ✓ Membantu DPRD dalam menemukan isu-isu actual yang menjadi perhatian utama masyarakat.
 - ✓ Memudahkan DPRD dalam menyerap aspirasi dan pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - ✓ Mengusulkan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 4. Organisasi Perangkat Daerah
 - ✓ Dapat melakukan perbaikan dalam manajemen dan pelaksanaan program-program yang mereka jalankan sehingga membantu menentukan arah kebijakan pembangunan agar tepat sasaran.
 - ✓ Dapat mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat.
 - ✓ Membantu OPD dalam memperkuat hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.
 - ✓ Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
 5. Masyarakat
 - ✓ Memudahkan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat secara mudah, cepat, efektif dan efisien.
 - ✓ Aspirasi dan pengaduan masyarakat langsung diteruskan kepada DPRD sehingga tidak terabaikan dan adanya kepastian tindak lanjut.



- ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses keputusan publik.

C. Kepemimpinan Strategis

Dalam implementasi proyek perubahan ini telah diterapkan Kepemimpinan Strategis mencakup strategi Pengelolaan Risiko, Pemanfaatan Peluang, dan Pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Pengelolaan Risiko

Selama pelaksanaan Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terdapat risiko yang telah teridentifikasi di Bab 2, sekaligus telah disusun strategi mitigasi untuk meminimalisir peluang dan dampak terjadinya risiko tersebut. Dalam implementasi proyek perubahan jangka pendek terdapat risiko permasalahan waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan Pelantikan pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang menyebabkan terjadinya kesibukan yang cukup tinggi dan menghambat koordinasi pelaksanaan implementasi proyek perubahan. Hal itu dapat mengakibatkan tujuan akhir dari proyek perubahan ini menjadi terhambat. Tindakan mitigasi pada risiko tersebut telah dilaksanakan dalam implementasi proyek perubahan pada jangka pendek ini berupa pembentukan Tim Efektif dan penyusunan Surat Edaran DPRD tentang Penyampaian aspirasi Masyarakat Nomor 005.160/04143/DPRD-SS/2024 serta pembuatan MoU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Pemanfaatan Peluang

Peluang yang muncul selama pemecahan permasalahan strategis dalam implementasi proyek perubahan adalah adanya komitmen dan tekad pemimpin di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sehingga menjadi modal Peningkatan Pelayanan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tim Efektif dan penyusunan Surat Edaran DPRD tentang Penyampaian aspirasi Masyarakat Nomor 005.160/04143/DPRD-SS/2024 serta pembuatan MoU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi



dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. tidak akan tersusun tanpa adanya dukungan dari pimpinan. Selain itu, adanya dasar hukum tentang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi peluang yang mendorong terlaksananya implementasi Peningkatan Pelayanan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien

Selama implementasi proyek perubahan ini tentunya terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan SDM dan Anggaran dalam mewujudkan peningkatan kinerja data dan sistem informasi SDA. Maka dari itu, perlu strategi untuk agar tujuan dari proyek perubahan ini tetap bisa tercapai dengan pengelolaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Strategi yang telah dilakukan adalah:

1. Perencanaan program kerja;

Implementasi proyek perubahan melibatkan pejabat dan staf yang telah memiliki tugas sesuai dengan tugas di unit kerjanya masing-masing. Maka dari itu telah disusun jadwal dan target output pelaksanaan serta pembagian tugas ke tiap tim efektif. SK Tim efektif disajikan pada lampiran.

2. Melakukan koordinasi dan dukungan bagi pelaksanaan proyek perubahan ini.

Pelaksanaan proyek perubahan ini telah mendapat dukungan dari pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, BPKAD, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan



BAB III

IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING; PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP; DAN ORGANISASI PEMBELAJAR

A. Implementasi Strategi Marketing (pra implementasi, proses implementasi, dan pasca implementasi jangka pendek)

1. Pra Implementasi

Untuk mewujudkan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Yang Responsif, Transparan Dan Akuntabel Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan komitmen yang tinggi dan marketing strategi yang jitu untuk mempercepat proses dan pencapaian tujuan. marketing strategi yang akan digunakan adalah 4P1C sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini :

- a. Product : Surat edaran tentang pedoman pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
SOP penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat.
konsep wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang belum terjangkau jaringan internet
- b. Place : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- c. Price : APBD dan sumber lain yang sah
- d. Promotion : Sosialisasi dan diseminasi di media sosial.
- e. Customer : Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan Masyarakat
- f. Branded : "TAKEPO"

Project Leader dalam memasarkan proyek perubahan ini berusaha meyakinkan stakeholder tentang manfaat dari proyek perubahan ini dengan mengungkapkan keunggulan proyek perubahan sebagai berikut

Dari sisi product, proyek perubahan ini dalam jangka pendek akan menghasilkan

- a. Surat edaran tentang pedoman pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Tersusunnya SOP penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- c. Tersusunnya konsep wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang belum terjangkau jaringan internet



Dari sisi price, pembentukan proyek perubahan ini berorientasi pada efisiensi anggaran, dimana pentingnya MoU antara OPD penerima aspirasi dengan Sekretariat DPRD sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

Dari sisi promotion, tim akan melakukan sosialisasi dan diseminasi serta menggunakan berbagai media yang bisa dimanfaatkan, baik dilakukan pertemuan langsung di seperti dalam rapat, media cetak dan internet, komunikasi dan konsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten dan relevan pun dilakukan secara masif dalam rangka penguatan konsep proyek perubahan serta dukungan berbagai pihak pada saat pelaksanaan.

Dari sisi place, lokasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Dari sisi customer proyek perubahan ini adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan Masyarakat

2. Proses Implementasi Strategi Marketing

Selama proyek perubahan ini, penulis memanfaatkan segala jenis media komunikasi untuk menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang terjalin merupakan hal penting yang dilakukan penulis, sebab komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Disinilah pentingnya berkoordinasi dan konsultasi.

Dalam berkoordinasi dan konsultasi, Stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan ini antara lain Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel dan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPKAD, BAPPEDA .

Terkait dengan Deseminasi dan publikasi Output Hasil Proyek Perubahan antara lain sebagai berikut

a. Deseminasi Output Hasil Proyek Perubahan

Diseminasi output hasil proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan dilaksanakannya Advokasi ke stakeholder internal/eksternal Pembentukan tim kerja, Membangun komitmen Bersama dan menerbitkan dan mensosialisasikan surat edaran Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel



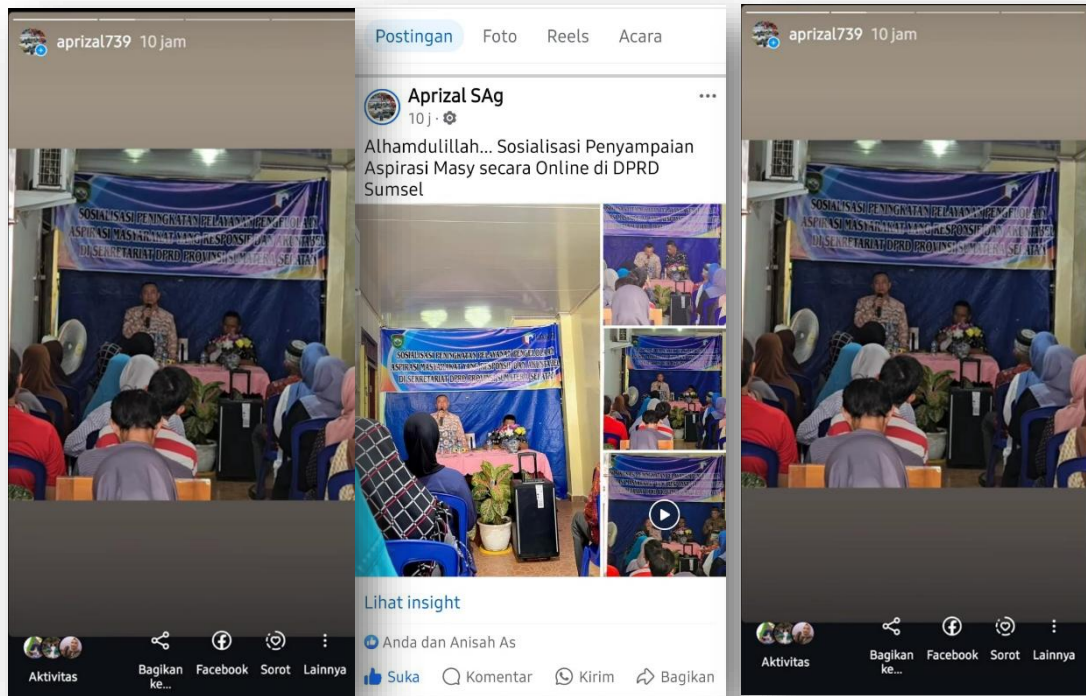
Gambar 3.1. Desiminasi Aspirasi Masyarakat

b. Publikasi Output Hasil Proyek Perubahan

Dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan melibatkan media online maupun media sosial lainnya, adapun media yang ikut serta mendukung dalam publikasi sebagai berikut



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN



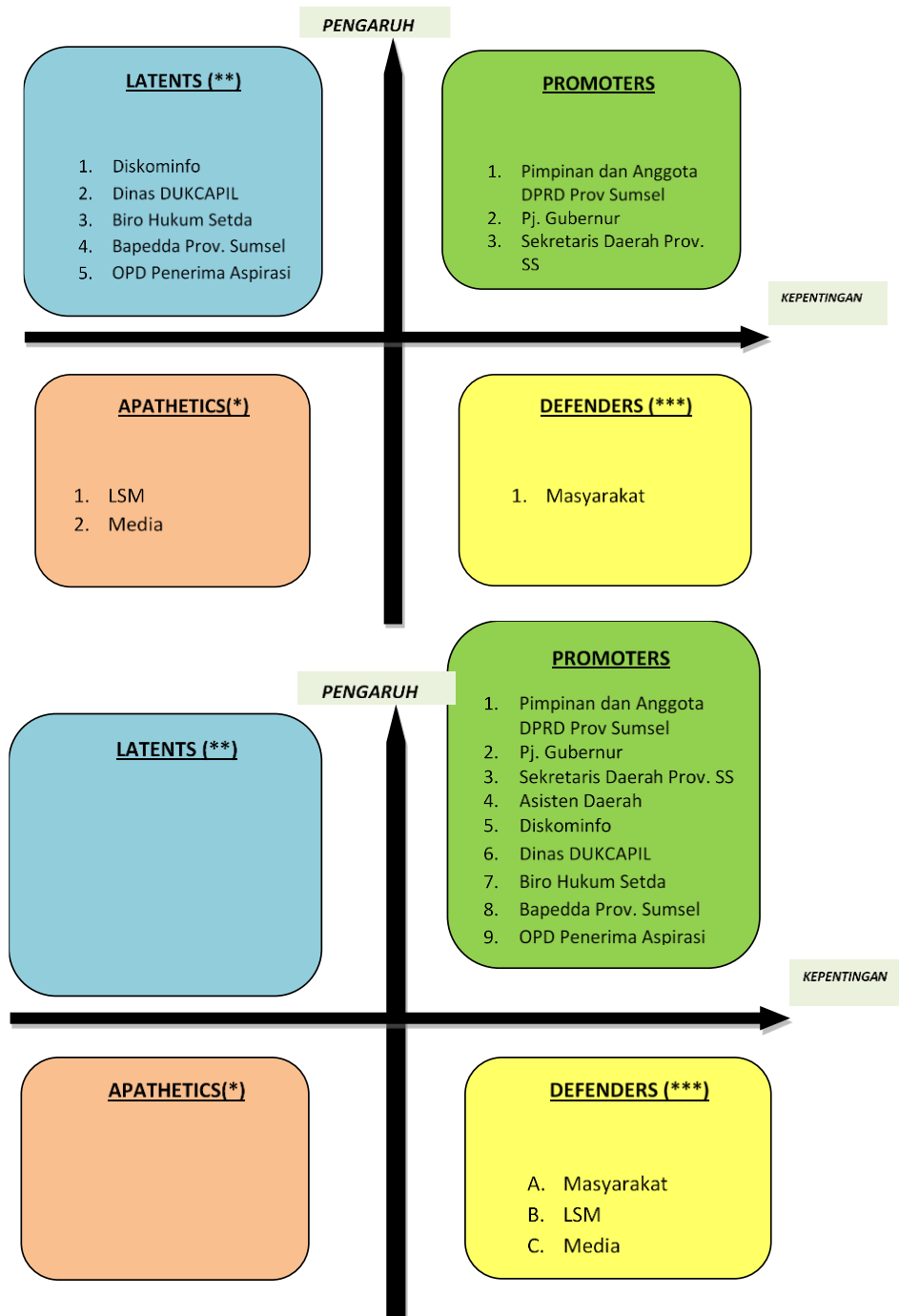
Gambar 3.2. Publikasi di Media Sosial



Gambar 3.2. Publikasi Aspirasi Masyarakat di Media Online

3. Pasca Implementasi

Dari hasil implementasi proyek perubahan telah terjadi perubahan pada stakeholder. Stakeholder yang berada pada posisi Latent berpindah ke posisi Promotor (mendukung proyek perubahan) dan yang berada di Apathetics berpindah ke posisi Defenders.





B. Pengembangan Organisasi Pembelajar

Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini, maka dibentuk tim yang solid dan memahami tugas dan tanggungjawab sebagai tim pelaksana proyek. Tim ini disebut sebagai Tim Efektif yang dibentuk dengan tujuan mewujudkan rencana proyek perubahan. Tim Efektif proyek perubahan ini terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, para pejabat Fungsional dan staff di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Peter Senge mendefinisikan Learning organisation adalah organisasi dimana pegawainya secara berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan, pola berfikir baru dan ekspansif ditumbuhkembangkan, keinginan bersama diberi ruang kebebasan dan pegawai secara terus menerus belajar bersama. Organisasi pembelajar merupakan organisasi yang mahir menciptakan, memperoleh, menginterpretasikan, mentransfer dan mempertahankan pengetahuan.

Personal mastery dilaksanakan salah satunya dalam bentuk kegiatan mentoring. Mentoring dilakukan secara berjenjang dan dilakukan rutin bulanan oleh masing masing struktural Eselon 3 dan 4 serta Koordinator Jabatan fungsional, dalam progress pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan proyek perubahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan learning organisation dalam pencapaian tujuan organisasinya. Diantaranya dengan pembangunan tim efektif. Hal ini disamping untuk pelaksanaan kegiatan proyek perubahan juga dimaksudkan untuk membangun Team Learning dengan mengkomunikasikan dengan seluruh unsur yang ada di internal Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk merumuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana mengerjakan apa yang dipahami serta menyiapkan ruang bagi kesalahan yang mungkin terjadi. Kegiatan Proyek Perubahan dikomunikasikan secara internal, pembentukan tim efektif hingga penyusunan Draft Peraturan Bupati dan sistem komunikasi yang efektif



dan efisien antara Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan stakeholders dalam rangka sosialisasi program TAKEPO. Selanjutnya project leader berupaya membagikan visi (Shared Vision) tentang pentingnya Proyek Perubahan TAKEPO sehingga seluruh team dapat memahami apa yang ingin dicapai dari program ini. Disamping itu, mental model yang ideal dilaksanakan dengan menerapkan disiplin serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan serta berupaya memacu anggota team agar kreatif dan dapat bekerjasama dengan baik. Dengan pemahaman yang terus menerus, seluruh bawahan mengetahui apa yang harus dikerjakan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Learning organisation ditandai dengan adanya pengembangan yang terus-menerus melalui ide-ide baru, pengetahuan dan pemahaman yang baru, yang dipergunakan secara terus-menerus untuk mengantisipasi, berinovasi dan menemukan cara-cara baru yang lebih baik dalam mencapai tujuan Proyek Perubahan ini. Dalam hal ini pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menjadi organisasi yang adaptif dan mampu menghadapi perubahan di masa depan.

Koordinasi dengan stakeholders, Bappeda, DPKAD, DKP, DPUPR, Diskominfo, maupun Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkaya pengetahuan project leader dan tim efektif sebagai upaya mendapatkan dukungan terkait peningkatan peran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Manajemen waktu yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan anggota tim efektif dan pelaksanaan proyek perubahan akan semakin meningkatkan kualitas SDM Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan hadirnya aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan khususnya terkait penyampaian aspirasi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Tim Efektif telah bekerja secara maksimal dengan memahami peran masing masing serta mampu berkolaborasi satu sama lainnya, baik dengan pihak internal maupun eksternal. Selain kerjasama yang baik, keberhasilan Tim Efektif ini juga didukung dengan kemampuan mengeksekusi instruksi yang diberikan oleh Project Leader selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selatan sebagai penanggungjawab pelaksanaan proyek perubahan. Begitu juga dengan jejaring yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.



BAB IV

KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Keberlanjutan Proyek perubahan ini sangat didukung oleh Sekretaris Daerah selaku Mentor dan ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat berkonsultasi bapak mentor berpesan kepada Project Leader bahwa proyek ini jangan hanya berhenti di seremonial saja. Beliau berpesan bahwa kegiatan ini agar segera dilaksanakan dan yg paling penting masyarakat dapat memanfaatkannya. Untuk keberlanjutan proyek perubahan maka pada kegiatan jangka menengah dan jangka panjang yaitu

A. Jangka Menengah

Implementasi aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dapat dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan kegiatan antara lain


1. pengolahan data aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi
2. verifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat
3. Klasifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat
4. Penyampaian dan penginputan aspirasi dan pengaduan masyarakat
5. Rapat koordinasi dengan DPRD dalam perumusan pokok-pokok pikiran berdasarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat
6. Melakukan evaluasi hasil kegiatan

B. Jangka Panjang

Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel

1. Rapat-rapat koordinasi Bersama OPD dan stakeholder terkait
2. Implementasi pokok pikiran DPRD dalam RKPD
3. melakukan evaluasi hasil kegiatan



 **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telepon
(0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
Email : samsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDWARD CANDRA
NIP : 19720906 199201 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama / IV.e
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dukungan terhadap Proyek Perubahan dengan judul "Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Responsif, Transparan dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh:


Nama : APRIZAL
NIP : 19720408 199803 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Satuan Kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan


Proyek perubahan ini sangat bermanfaat dalam pemenuhan hak Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara efektif dan efisien

Demikian surat pernyataan dukungan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Palembang, November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


EDWARD CANDRA
Pembina Utama / IV.e
NIP. 19720906 199201 002

 Dipindai dengan CamScanner

Gambar 4.1. Pernyataan dukungan terhadap keberlangsungan proyek perubahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



BAB V

PEMANFAATAN MATA PELATIHAN PILIHAN DALAM IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pemanfaatkan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Yang Responsif, Transparan Dan Akuntabel Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memuat uraian singkat substansi mata pelatihan pilihan apa saja yang diambil, proses delivery-nya, dan menjelaskan proses adopsi/adaptasi/hubungan dari mata pelatihan pilihan tersebut dalam implementasi proyek perubahan.

Dalam melaksanakan proyek perubahan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Yang Responsif, Transparan Dan Akuntabel Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil dari Project Leader mengikuti dan menerapkan apa yang telah dipelajari selama Pelatihan Kepemimpinan Nasional sebagai berikut :

a. Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi

Mata pelatihan ini melatih project leader untuk memiliki keterampilan dalam mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi sehingga project leader memiliki kemampuan mengelola hubungan kerja produktif antar generasi yang berbeda karakteristik dan strategi yang dibutuhkan dalam rangka memastikan tingginya etos kerja tim dan tercapainya kinerja organisasi sehingga project leader dapat mensinergikan berbagai unsur dalam pemerintahan dan keberlanjutan proyek perubahan sehingga dapat berjalan lancar sesuai tahapan yang disusun dan dukungan stakeholder untuk menjamin keberlanjutan Aksi Perubahan



Gambar 5.2 Sertifikat Mata Pelatihan Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi

b. Keterampilan Digital dalam penyusunan kebijakan

Mata pelatihan ini menuntuk project leader untuk memiliki kesadaran digital dalam menjalankan perilaku kepemimpinannya melalui proses kolaborasi, inovasi dan komunikasi dengan seluruh lini organisasi

Dalam Keterampilan Digital karena ada peran teknologi mendukung aksesibilitas, efektifitas dan efisiensi layanan khususnya dalam memberikan pemahaman terkait aplikasi Aspirasi Masyarakat.



Gambar 5.3 Sertifikat Mata Pelatihan Keterampilan Digital dalam penyusunan kebijakan

c. Resiliensi Diri

Mata pelatihan Self resiliensi telah mengajarkan dan melatih project leader dengan pengetahuan ketahanan diri untuk mengendalikan situasi penuh stres sebagai dampak tekanan pekerjaan sehingga dapat bertumbuh ke arah positif sehingga memiliki kemampuan dalam mengelola kapasitas dan proses dinamis untuk mengatasi stres dan kesulitan secara adaptif sambil mempertahankan fungsi psikologis dan fisik yang normal dalam menjalankan perannya sebagai Pemimpin Perubahan.



Gambar 5.1 Sertifikat Mata Pelatihan Resiliensi Diri

BAB VI

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM ADOPSI PROYEK PERUBAHAN

Perubahan kompetensi yang dilaksanakan dan memerlukan komitmen dari pimpinan dan pegawai, serta perencanaan yang matang. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kompetensi pegawai, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan proyek perubahan proyek perubahan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Yang Responsif, Transparan Dan Akuntabel Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran:

Pihak Terdampak Proyek Perubahan	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (klasikal/non klasikal)	BUKTI
1 Tim Proyek Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Pengelolaan Teknologi Informasi b. Keterampilan Komunikasi dan Sosialisasi c. Pemahaman Tata Kelola Pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mentoring dan Pembinaan b. Pendampingan dan Implementasi c. Bergabung dalam Forum Diskusi 	
2 Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Teknologi Informasi dan digitalisasi b. Kemampuan komunikasi c. Kemampuan Beradaptasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan b. Bergabung dalam ruang diskusi (Forum Diskusi) 	
3 Anggota DPRD	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan komunikasi b. Kemampuan Beradaptasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan b. Bergabung dalam Forum Diskusi 	



BAB VII

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Implementasi pengembangan potensi diri tentunya tidak lepas dari minat, bakat dan kemampuan. Dari hasil identifikasi pengenalan diri dapat diketahui beberapa kekurangan dan kelebihan sehingga langkah-langkah rencana pengembangan diri akan lebih efektif ditindaklanjuti dengan diskusi dan bimbingan intensif baik secara kedinasan maupun non kedinasan

Memperhatikan nilai pada sub aspek pada Formulir Peserta, Mentor dan Rekap nilai gabungan, rencana dan strategi pelaksanaan pengembangan kepada peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku.

Adapun Implementasi Strategi Pengembangan Potensi Diri adalah sebagai berikut:



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PANDUAN INTERVENSI	KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI UNTUK Mendukung PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	KEGIATAN / TAHAPAN AKSI PERUBAHAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI		BUKTI
					RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Integritas						
	Pengambilan Keputusan Dilematis	Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta menyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	<p>Pengembangan Mandiri Penguatan kemampuan interpersonal, melalui pendalaman teknik persuasi, teknik penanganan konflik, mediasi serta kemampuan mengambil langkah politis dalam koridor birokrasi yang sah.</p> <p>Pengembangan Melalui Penugasan Pelibatan dalam bentuk secondment atau shadowing untuk memahami lebih dalam praktik pengambilan keputusan pada posisi strategis serta tuntutan mengakomodir kepentingan beragam di organisasi</p>	<p>Membentuk tim kerja</p> <p>Merancang draft MoU</p>	Minggu I	Minggu I	
					Minggu III	Minggu III	



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

2	Kerjasama Flexibilitas	Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi	Pengembangan Mandiri Melibatkan diri dalam forum-forum diskusi atau komunitas di lingkungan organisasi ataupun profesi untuk membiasakan diri berhadapan dengan pihak-pihak lain	Mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait	Minggu II	Minggu II	
			Pengembangan Melalui Penugasan Penugasan untuk menjadi penyaji atau penyampai argumen terhadap usulan dari unit atau kelompok kerja tertentu yang berhadapan dengan para pimpinan atau pemangku kebijakan untuk mengasah kemampuan persuasi serta keluwesan menyesuaikan karakter pendengar				
3	Mengelola perubahan						
	Inisiatif	Menjadi agent of change yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan.	Pengembangan Mandiri Pembelajaran mengenai kepemimpinan transformasional khususnya pada aspek kemampuan membangun komunikasi interpersonal dalam rangka menggerakkan orang lain berdasarkan inisiatif yang dibangun.	Melaksanakan rapat	Minggu IV	Minggu IV	
			Pengembangan Melalui Penugasan	Melaksanakan sosialisasi	Minggu VII	Minggu VII	



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

			Penugasan dalam menelaah suatu kebijakan atau arahan pimpinan yang mengandung adanya perubahan sehingga membangun kemampuan menyiapkan urgumen logis sebagai landasan melakukan inisiasi sikap/langkah kerja	layanan aspirasi			
--	--	--	--	------------------	--	--	--



BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proyek perubahan ini telah dilaksanakan sesuai dengan Output yang ditetapkan berkat kerja keras Tim Efektif dan Komitmen *Project Leader* dalam mencapai tujuan. Pengembangan terhadap potensi diri akan terus dilakukan baik dalam Integritas, Kerjasama maupun dalam Pengelolaan Perubahan akan senantiasa dijadikan tolok ukur dalam aplikasi kepemimpinan

B. Rekomendasi

Proyek perubahan ini memiliki peran strategis dan perspektif kedepan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan melalui DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Dibutuhkan anggaran dalam mendukung peningkatan sarana prasarana dan peningkatan SDM dalam rangka pengembangan sistem yang ada bagi peningkatan pelayanan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Perlu dibuat kajian yang lebih mendalam terkait pengembangan sistem lebih lanjut terkait pengelolaan aspirasi masyarakat.

C. *Lesson Learned*

1. Kerjasama dan kolaborasi yang solid sangat diperlukan dalam keberhasilan mencapai tujuan yang diharapkan
2. Strategi komunikasi yang efektif sangat mempengaruhi dukungan stakeholders terhadap keberhasilan pencapaian tujuan
3. Kepemimpinan kolaboratif dapat mengakomodir kebutuhan sesuai perkembangan situasi, dapat merumuskan kebijakan yang adaptif dan dapat membuat gagasan dan inovasi menjadi kenyataan yang berguna bagi organisasi baik di masa kini maupun masa yang akan datang
4. Kepemimpinan yang berfikir secara holistik mampu melihat persoalan secara lebih menyeluruh sehingga gagasan pemecahan masalahnya tidak hanya "reaktif" tetapi juga "preventif"



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2017). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia.
- Siregar, H. (2016). Demokrasi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan di DPRD. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(2), 125-142.
- Setiawan, E. (2018). Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmawati, A., & Nugroho, Y. (2015). "Model Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Proses Legislasi di DPRD". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(3), 45-59.
- Kurniawan, D., & Anwar, A. (2020). "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Penyerapan Aspirasi di DPRD Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Studi Masyarakat*, 13(1), 72-88.
- Suryana, S. (2020). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Politik di DPRD: Studi Kasus di Provinsi Yogyakarta. Yogyakarta: LKiS.
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah (LPPD). (2019). Laporan Evaluasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat di DPRD. Jakarta: LPPD.
- Prasetyo, D. (2014). "Peran Forum Musyawarah Antar Dewan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat". *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2), 159-173.



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Dukungan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telepon
: (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
Email : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDWARD CANDRA
NIP : 19720906 199201 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama / IV.e
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dukungan terhadap Proyek Perubahan dengan judul "Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Responsif, Transparan dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh:

Nama : APRIZAL
NIP : 19720408 199803 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Satuan Kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Proyek perubahan ini sangat bermanfaat dalam pemenuhan hak Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara efektif dan efisien

Demikian surat pernyataan dukungan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Palembang, November 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA
Pembina Utama / IV.e
NIP. 19720906 199201 002

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIKA EFIANTI, S.E., M.M.
NIP : 19840722 200803 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dukungan terhadap Proyek Perubahan dengan judul "Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Responsif, Transparan dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh:

Nama : H. APRIZAL, S.Ag., S.E., M.Si
NIP : 19720408 199803 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Satuan Kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Proyek perubahan ini sangat bermanfaat dalam pemenuhan hak Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara efektif dan efisien.

Demikian surat pernyataan dukungan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Palembang, November 2024

KEPALA DINAS KOMINFO
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

RIKA EFIANTI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19840722 200803 2 002



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUADI, S.Pd.
NIP : 19660211 199003 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas DUKCAPIL Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dukungan terhadap Proyek Perubahan dengan judul "Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Responsif, Transparan dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh:

Nama : H. APRIZAL, S.Ag., S.E., M.Si
NIP : 19720408 199803 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Satuan Kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Proyek perubahan ini sangat bermanfaat dalam pemenuhan hak Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara efektif dan efisien.

Demikian surat pernyataan dukungan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Palembang, November 2024

KEPALA DINAS DUKCAPIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



PUADI, S.Pd.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19660211 199003 1 001

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
NIP : 19820816 200112 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dukungan terhadap Proyek Perubahan dengan judul "Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Responsif, Transparan dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh:

Nama : H. APRIZAL, S.Ag., S.E., M.Si
NIP : 19720408 199803 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Satuan Kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Proyek perubahan ini sangat bermanfaat dalam pemenuhan hak Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara efektif dan efisien.

Demikian surat pernyataan dukungan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Palembang, November 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



YOSSI HERVANDI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19820816 200112 1 004



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDI HARAPAN, S.E., S.H., M.Si., C.MSP
NIP : 19780907 200701 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dukungan terhadap Proyek Perubahan dengan judul "Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Responsif, Transparan dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh:

Nama : H. APRIZAL, S.Ag., S.E., M.Si
NIP : 19720408 199803 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Satuan Kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Proyek perubahan ini sangat bermanfaat dalam pemenuhan hak Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara efektif dan efisien.

Demikian surat pernyataan dukungan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Palembang, November 2024

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



DEDI HARAPAN, S.E., S.H., M.Si., C.MSP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 1970907 200701 1 005

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REGINA ARIYANTI, S.T.
NIP : 19671204 200212 2 003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dukungan terhadap Proyek Perubahan dengan judul "Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Responsif, Transparan dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh:

Nama : H. APRIZAL, S.Ag., S.E., M.Si
NIP : 19720408 199803 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Satuan Kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Proyek perubahan ini sangat bermanfaat dalam pemenuhan hak Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara efektif dan efisien.

Demikian surat pernyataan dukungan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Palembang, November 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



REGINA ARIYANTI, S.T.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19671204 200212 2 003



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

2. Undangan Sosialisasi

DAFTAR HADIR SOSIALISASI
PROYEK PERUBAHAN PKN TINGKAT II ANGGATAN XXXVII
PENINGKATAN PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Sabtu / 4 Desember 2024.
Pukul : 14.00.
Tempat : Kec. Ilir Timur II Palembang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurhaya	Ket.RW 07	[Signature]
2.	R.A. Harsanti	Ket. 33	[Signature]
3.	Fustina	Ketua Rt. 06	[Signature]
4.	Rosmalu Demis	Ketua RT 29	[Signature]
5.	Abdul Halim	Ka RW 02 Ilir	[Signature]
6.	Krs M Anwar Han	RT 06 Ilir	[Signature]
7.	Agus Arpic	Kt. 45 3 Ilir	[Signature]
8.	M. Imran	Kel 3 Ilir Rt. 41	[Signature]
9.	Junardi	Kel. 3 Ilir. RW 10	[Signature]
10.	Suzli	Kel 3 Ilir RW 26	[Signature]
11.	Riza Fakhre	RT 43 kel. 3 Ilir	[Signature]
12.	DATIM S	NW 06 3 Ilir	[Signature]
13.	M. Ridwan	RW 08 3 Ilir	[Signature]
14.	Yanuardi	RW 07 3 Ilir	[Signature]
15.	M. NIKMATH	RT 07 ILIR	[Signature]
16.	Dwi	RT 05 1 Ilir	[Signature]
17.	Diana	RT 08 Ilir.	[Signature]
18.	Sriwati	RT 01 1 Ilir	[Signature]

19.	Maria	RT 08	[Signature]
20.	Safari	RT 08	[Signature]
21.	Ardi	,	[Signature]
22.	Durshman	Malyarabat	[Signature]
23.	SUDIRMAN	,	[Signature]
24.	ERDIA SURAGMAN	,	[Signature]
25.	Muhammad Rizki A	,	[Signature]
26.	PURYONO	,	[Signature]
27.	Boy	,	[Signature]
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

PALEMBANG, 2024
 SEKRETARIS DPRD PROVINSI
 SUMATERA SELATAN

 H. APRIZAL S.A.P. S.E. M.Si
 Sekretaris Utama Muda (I/c)
 NIP. 19720408 199403 1 005



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAFTAR HADIR SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN PKN TINGKAT II ANGGATAN XXXVII PENINGKATAN PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

Hari/Tanggal: Rabu / 4 DESEMBER 2024
Pukul : 09.00
Tempat : Kecamatan Kalidoni Palembang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Fauzanisrah	Warga RT.06	Ab.
2.	Binar Aqba Semesta	Warga RT.06	Isi
3.	Maman	warga RT.06	MI
4.	SAIMAN	Warga RT.06	Si.
5.	OYET	warga RT.06	Oy.
6.	LAKMOK	WARGA RT 06	Luf
7.	KOSASIT	WARGA RT 06	Lum
8.	Fauzan	Warga RT 06	fu
9.	Ahmad Faisal D	warga RT 06	fu
10.	Heni Apriyanti Utami	Warga RT 06	Hen
11.	Nur Hasanah Indah O	Warga RT 06	Nur
12.	Kastini	Warga RT 06	Ka
13.	Murdiah	Warga RT 06	Mur
14.	Rini	Warga RT 06	Ri
15.	NITA	Warga RT 06	Nita
16.	Rizka Dwi Agustina	warga RT 06	Rizka
17.	Nub	warga RT	Nub
18.	ROZALLOIS	Warga RT 06	Roz

19.	Micnah	warga RT 06	Mic
20.	Juni Apriyana	Warga RT 06	Juni
21.	Answella Ayu E.	Warga RT 06	Answ
22.	Aulia FACHA MAHARANI	Warga RT. 06	Aulia
23.	Hamidah	Warga RT. 06	Ham
24.	Soleha	warga RT 06	Sole
25.	Bambang Andharta	warga RT 06	Bam
26.	Rini Atin	warga RT. 06	Rini
27.	Anggi Zaria	Warga RT.06	Anggi
28.	Puspita Aidil Fitri	Warga RT 06	Puspita
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

Mengetahui
Ketua RS-06/02



Durahman



H. APRIZAL SAG, S.E., M.Si
Pembing Ulama Muda (Vic)
NIP. 19720408 199803 1 005



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAFTAR HADIR SOSIALISASI
PROYEK PERUBAHAN PKN TINGKAT II ANGGATAN XXXVII
PENINGKATAN PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

Hari/Tanggal: Selasa / 3 Desember 2024
Pukul : 19.00.
Tempat : Kec. Sematang Boang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Santi	Masyarakat	[Signature]
2.	Agus	RW 06 Rt.06	[Signature]
3.	M. Balluri S	warga kec Sematang Boang	[Signature]
4.	Sutri Apriyanti	Rt 04	[Signature]
5.	Sartoro	Warga Rt 08	[Signature]
6.	DINDO	"	[Signature]
7.	Mawlat	Rt.53	[Signature]
8.	Ara	Rt. 55	[Signature]
9.	NurSimah	warga kec sematang boang	[Signature]
10.	Muesi	"	[Signature]
11.	Mucna	"	[Signature]
12.	Atik	"	[Signature]
13.	Endah	"	[Signature]
14.	adelia	Rt 09	[Signature]
15.	Karna	Rt. 58	[Signature]
16.	Ema	"	[Signature]
17.	Marina	"	[Signature]
18.	Mardiani	"	[Signature]

19.	Maia	Rt 00	[Signature]
20.	Safal	Rt. 08	[Signature]
21.	Ardi	"	[Signature]
22.	Durshman	Masyarakat	[Signature]
23.	SUDIRMAN	"	[Signature]
24.	ENOK SURAGMAN	"	[Signature]
25.	Muhammad Rizki A	"	[Signature]
26.	PURYONO	"	[Signature]
27.	Boy	"	[Signature]
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

PALEMBANG, 2024
 SEKRETARIS DPRD PROVINSI
 SUMATERA SELATAN

 H. APRIZAL S.A.G., S.E., M.Si
 Kompting Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19720408 19903 1 005



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

3. Undangan Sosialisasi



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DPRD

Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30137
Telepon (0711) 313184, 311537, 351272, Faksimile (0711) 320121
laman dprd sumselprov.go.id, Pos-el dprd_prov_sumsel@yahoo.co.id

Nomor : 005/ 003 /Setwan/2024
Lampiran :-
Perihal : Undangan Sosialisasi

Palembang, 29 November 2024
Kepada Yth. Bapak/Ibu
Masyarakat Kecamatan Sematang Borang
di
PALEMBANG

Dengan hormat,

Sehubungan kegiatan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Provinsi Sumatera Selatan dengan Judul "Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Responsif, Transparan dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan" dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 3 Desember 2024
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Lurah Suka Mulya
Acara : Sosialisasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN

H. APRIZAL, S.A.G., S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720408 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DPRD

Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30137
Telepon (0711) 313184, 311537, 351272, Faksimile (0711) 320121
laman dprd sumselprov.go.id, Pos-el dprd_prov_sumsel@yahoo.co.id

Nomor : 005/ 004 /Setwan/2024
Lampiran :-
Perihal : Undangan Sosialisasi

Palembang, 29 November 2024
Kepada Yth. Bapak/Ibu
Masyarakat Kecamatan Kalidoni
di
PALEMBANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Provinsi Sumatera Selatan dengan Judul "Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Responsif, Transparan dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan" dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 3 Desember 2024
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Lurah Suka Mulya
Acara : Sosialisasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN

H. APRIZAL, S.A.G., S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720408 199803 1 005



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DPRD

Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30137
Telepon (0711) 313184, 311537, 351272, Faksimile (0711) 320121
laman dprd sumselprov.go.id, Pos-el dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id

Nomor : 005/ 005 /Setwan/2024

Palembang, 29 November 2024

Lampiran : -

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Perihal : Undangan Sosialisasi

Masyarakat Kecamatan Ilir Timur II
di

PALEMBANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Provinsi Sumatera Selatan dengan Judul **"Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Responsif, Transparan dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan"** dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 3 Desember 2024

Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Kantor Lurah Suka Mulya

Acara : Sosialisasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat bagi Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Selatan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN



H. APRIZAL, S.A.G., S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720408 199903 1 005